

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Desa

Desa Sidoharjo adalah merupakan desa pemekaran dari desa Kreet. Dilatarbelakangi oleh begitu beratnya percepatan pembangunan di Desa Kreet yang memiliki luas wilayah lebih dari 25 Km² dan terbagi dalam 9 Dukuh dengan jumlah penduduk yang mencapai 12 ribu jiwa. Hal lain yang mendasari yakni kebutuhan program pembangunan yang lebih intensif terhadap beberapa dukuh di wilayah selatan. Pada bulan September 2005, Pemerintah Desa Kreet mengadakan musyawarah Desa di Balai Desa Kreet, yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kreet, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh-tokoh dari berbagai elemen masyarakat Desa Kreet serta seluruh jajaran Muspika Kecamatan Jambon. Dalam musyawarah tersebut akhirnya disepakati beberapa hal yang menjadi keputusan musyawarah, antara lain:

- Perlu ada pemekaran atau pemecahan Desa Kreet.
- Desa Kreet dimekarkan menjadi 2 desa.
- Wilayah desa pemekaran mencakup 3 dukuh, yaitu Dukuh Klitik, Dukuh Karang Sengon dan Dukuh Sidowayah.
- Desa pemekaran diberi nama Desa Sidorejo

Sebelum keputusan musyawarah tersebut dilaporkan kepada Bupati Ponorogo untuk ditindaklanjuti Pemerintah Daerah, Kepala Desa Kreet berkeinginan merubah nama desa pemekaran. Maka diadakanlah musyawarah kedua untuk membahas kembali nama desa baru yang akan dibentuk. Peserta Musyawarah akhirnya mufakat untuk mengganti nama Sidorejo menjadi Sidoharjo.

Pada tanggal 10 Agustus 2006, Bupati Ponorogo meresmikan hasil pemekaran dari Desa Kreet dengan nama Desa Persiapan Sidoharjo, sekaligus melantik Sdr. Mesidi, kamituwo dukuh Klitik, sebagai Penjabat Kepala Desa. Setelah peresmian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memberi waktu 1 (satu) tahun kepada Desa Persiapan Sidoharjo untuk mempersiapkan diri menjadi Desa Definitif.

Atas usaha dan kerjasama seluruh warga masyarakat masa uji coba tersebut dapat dilalui dengan baik. Selang 1 (satu) tahun sejak diresmikan menjadi Desa Persiapan, Dengan menyerahkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 1449 tanggal 22

Agustus 2007, tepat tanggal 11 September 2007 Bupati Ponorogo meresmikan Desa Persiapan Sidoharjo menjadi Desa Sidoharjo.

4.2 Karakteristik Kemiskinan Desa Sidoharjo

4.2.1 Permasalahan Desa

Desa Sidoharjo merupakan merupakan wilayah pemekaran Desa Kreet. Pada tahun 2007, Desa Sidoharjo diresmikan oleh Bupati Ponorogo pada saat itu. Desa Sidoharjo yang baru terbentuk saat itu memerlukan penyesuain dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Dokumen Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman Desa Miskin Tertinggal di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tahun 2011, Desa Sidoharjo termasuk dalam kategori desa miskin tertinggal prioritas. Dalam kategori ini, desa Sidoharjo memerlukan alternatif prioritas penanganan.

Aspek-aspek yang digunakan dalam penentuan tersebut antara lain aksesibilitas, potensi kependudukan, kemampuan ekonomi wilayah serta sarana dan prasarana permukiman. Desa Sidoharjo memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 60% dai keseluruhan jumlah kk di desa tersebut. Berdasarkan RPJM Desa Sidoharjo tahun 2011-2015, Jumlah KK miskin mencapai 961 kk dari 1601 kk desa. Desa Sidoharjo juga memiliki angka keterbelakangan mental penduduk yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Jambon.

Tabel 4.1 Jumlah masyarakat Keterbelakangan metal di Kecamatan Jambon

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penderita	Prosentase
1	Kreet	86	13,8%
2	Jonggol	46	7,5%
3	Poko	13	2,1%
4	Bringinan	10	1,6%
5	Sendang	19	3,1%
6	KarangloKidul	14	2,3%
7	Bululor	18	2,8%
8	Jambon	13	2,1%
9	Blembem	17	2,7%
10	Pulosari	13	2,1%
11	Menang	9	1,4%
12	Srandil	11	1,8%
13	Sidoharjo	352	56,7%
Total		621	100%

Sumber: Kecamatan Jambon dalam angka tahun 2012

Berdasarkan karakternya, masyarakat keterbelakangan mental di Desa Sidoharjo dibagi menjadi tiga tipe yakni:

1. Anak tunagrahita mampu didik (debil)
 - a. Membaca, menulis, mengeja dan berhitung.

- b. Menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain.
 - c. Keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja di kemudian hari.
2. Anak tunagrahita mampu latih (imbecil)
 - a. Belajar mengurus diri sendiri.
 - b. Belajar menyesuaikan di lingkungan rumah.
 - c. Mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, di bengkel kerja, atau di lembaga khusus.
 3. Anak tunagrahita mampu rawat (idiot)
 - a. Tidak mampu mengurus diri sendiri.
 - b. Membutuhkan perawatan sepenuhnya sepanjang hidup.

Tabel 4.2 Karakter masyarakat keterbelakangan mental Desa Sidoharjo

No	Karakter Masyarakat Keterbelakangan	Jumlah
1.	Penyandang tunagrahita mampu didik (debil)	120
2.	Penyandang tunagrahita mampu latih (imbecil)	223
3.	Penyandang tunagrahita mampu rawat (idiot)	9

Sumber: Hasil Wawancara 2012

Masyarakat keterbelakangan mental jenis Debil, masih bisa beraktifitas seperti manusia normal. Hanya saja masih perlu didampingi oleh anggota keluarga yang normal. Masyarakat dengan keterbelakangan mental jenis Debil ini juga sudah mengenal jenis mata uang sehingga bisa melayani pembeli di pasar ataupun warung-warung kecil. Jumlah Masyarakat dengan keterbelakangan mental jenis Debil di Desa Sidoharjo berjumlah 120 orang yang sebagian besar bermukim di Dukuh Sidowayah,.

Masyarakat keterbelakangan mental dengan tingkatan idiot, tidak dapat melakukan aktifitas seperti layaknya manusia normal sehingga harus memperoleh perhatian khusus dari anggota keluarganya. Di Desa Sidoharjo masyarakat idiot berjumlah 9 orang. Semuanya memperoleh tunjangan seumur hidup dari pemerintah berupa makanan sehari-hari, garam beryodium dan barang-barang keperluan lainnya.

Terjadi perdebatan diberbagai kalangan terkait penyebab banyaknya masyarakat keterbelakangan mental. Keberadaan masyarakat tersebut dapat diakibatkan pernikahan sedarah. Sebab lain dapat diakibatkan akibat ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan faktor mendasar yakni kemiskinan. Masyarakat keterbelakangan mental yang ada di Desa Sidoharjo cenderung berasal dai keluarga pra sejahtera. Kondisi kemiskinan yang dialami membuat ibu hamil kurang mendapat asupan gizi untuk janin.

Kondisi desa Sidoharjo termasuk sulit mendapatkan air bersih ketika musim kemarau. Letak desa yang berada di kaki bukit/daerah perbukitan kapur membuat tanah desa termasuk dalam tanah yang kurang subur.



Gambar 4.1 Hutan di sekitar Desa Sidoharjo yang mengalami kebakaran

Masyarakat juga belum bersedia membuat penampungan air ketika musim penghujan sebagai antisipasi ketika musim kemarau datang. Akibatnya ketika musim penghujan sumber air yang ada di desa memiliki persediaan air yang melimpah namun ketika musim kemarau desa mengalami kekeringan.



Gambar 4.2 Sungai di sekitar desa yang mengalami kekeringan

Pemerintah desa secara aktif memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk membuat tempat penampungan air secara individu namun masyarakat masih enggan untuk membuat tandon-tandon penampungan air. Hal ini juga membuat pertanian padi sawah kurang berkembang. Setiap musim kemarau, Desa Sidoharjo menerima bantuan air bersih dari Dinas PU, namun bantuan tersebut dianggap masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemberian bantuan air bersih tidak menyelesaikan permasalahan air bersih di Desa Sidoharjo. Masyarakat perlu secara aktif melakukan antisipasi dalam pemenuhan air bersih dengan membangun tandon-tandon penampungan air sehingga masyarakat desa tidak mengalami kekeringan di musim kemarau serta secara aktif melakukan reboisasi hutan serta pengawasan terhadap kebakaran yang sering terjadi pada hutan di sekitar Desa Sidoharjo.

4.2.2 Konseptual Kemiskinan di Desa Sidoharjo

Berdasarkan BPS (2008) kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Tabel 4.3 Termologi kemiskinan berdasarkan BPS

No	Kemiskinan	Pengertian Kemiskinan Berdasarkan BPS (2008)	Aspek yang dilihat	Eksisting Desa Sidoharjo
1.	Absolut	Kemiskinan absolut menurut BPS, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilai minimum kebutuhan dasar yang dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidak mampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. • Pendekatan rata-rata pendapatan per-kapita yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% kk di Desa Sidoharjo termasuk dalam kk miskin • 83,5% masyarakat memiliki rumah non permanen • Terdapat masyarakat down syndrom \pm 352 jiwa akibat kekurangan gizi • Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa
2.	Relatif	suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilihat berdasarkan kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Kecamatan Jambon dalam angka tahun 2012, pendapatan Desa Sidoharjo termasuk dalam taraf rendah yakni Rp 33.904.000,- namun pendapatan paling rendah desa yakni Desa Srandil Rp 25.250.000,-
3.	Kultural	kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, tradisi dan kebiasaan yang cenderung mengarahkan masyarakat pada sikap apatis, pasrah	<ul style="list-style-type: none"> • masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas • individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat masih memiliki pola pikir sederhana • Masyarakat belum dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal, misalnya pemberian bantuan berupa hewan ternak. Masyarakat penerima bantuan cenderung memilih menjual kembali bantuan hewan ternak yang

No	Kemiskinan	Pengertian Kemiskinan Berdasarkan BPS (2008)	Aspek yang dilihat	Eksisting Desa Sidoharjo
4.	Struktural	pada nasib, boros dan bahkan tidak kreatif sekalipun ada bantuan dari pihak luar. kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Kemiskinan dalam kondisi struktur demikian tidak disebabkan oleh faktor-faktor yang alami atau faktor-faktor pribadi dari orang miskin itu sendiri melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil.	<ul style="list-style-type: none"> masyarakat yang tidak berkecukupan atau miskin tidak memiliki akses ke pembuat keputusan dan pembuat kebijakan, tidak adanya transparansi dan keterbukaan pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan kebijakan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. 	diperoleh agar lebih cepat memperoleh uang <ul style="list-style-type: none"> Program bantuan diutamakan untuk menstimulasi masyarakat agar mandiri dengan bantuan pemberdayaan masyarakat Program bantuan yang sampai ke desa melibatkan lembaga-lembaga yang ada di desa. Lembaga desa turut serta dalam pelaksanaan serta pelaksanaan bantuan

Sumber: Hasil Analisis 2013

Berdasarkan tabel diatas Desa Sidoharjo cenderung termasuk dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan kultural berdasarkan pengertian yang dilihat dengan kondisi eksisting di Desa Sidoharjo.

4.3 Gambaran Umum Desa Sidoharjo

4.3.1 Karakteristik Wilayah Desa Sidoharjo

A. Batas Administrasi

Desa Sidoharjo berada di Kecamatan Jambon bagian selatan. Jarak Desa Sidoharjo dari ibukota kecamatan yaitu sejauh 11 km. Desa Sidoharjo memiliki luas wilayah 1.219 ha yang terbagi menjadi 3 dukuh, 3 RW, dan 31 RT. Adapun batas-batas administrasi Desa Krebet adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Krebet

Sebelah Barat : Kecamatan Badegan

Sebelah Selatan : Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong

Sebelah Timur : Desa Bulu Lor, Desa Jonggol

B. Topografi

Berdasarkan Profil Desa Sidoharjo 2011, Desa Sidoharjo berada pada ketinggian 325 mdpl. Bentang alam Desa Sidoharjo terdiri atas dataran dan perbukitan/pegunungan serta terdapat hutan yang mengelilingi Desa Sidoharjo. Luas dataran di Desa Sidoharjo seluas 731,4 ha sedangkan perbukitan/pegunungan seluas 487,6 Ha.

C. Geologi

Jenis tanah di Desa Sidoharjo terdiri atas Tanah Alluvial dan Regosol dengan tingkat kesuburan rendah. Berdasarkan Profil Desa Sidoharjo tahun 2011 tingkat kesuburan tanah di Desa Sidoharjo yakni tingkat sedang seluas 9,25 ha sedangkan tidak subur/kritis seluas 30,633 ha. Pertanian desa di dominasi dengan tanaman palawija yakni jagung dan ubi kayu dibandingkan padi sawah akibat kondisi desa yang sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Kekeringan yang di alami Desa Sidoharjo berakibat pertanian yang kurang berkembang sehingga petani memilih menanam palawija yang membutuhkan air lebih sedikit dibandingkan padi.

D. Karakteristik Tata Guna Lahan

Karakteristik tata guna lahan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon berkaitan dengan luas penggunaan lahan terbangun dan lahan tak terbangun.

Tabel 4.4 Luas Desa Sidoharjo berdasarkan Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Permukiman	111,63	9,15%
2	Persawahan	39,88	3,27%
3	Ladang/Tegalan	238,89	19,69%
4	Perkebunan	57,33	4,70%
5	Hutan	812,11	66,62%
6	Pemakaman	2,63	0,21%
7	Perkantoran	0,63	0,05%
8	Prasarana lain	3,41	0,28%
	Total	1.219	100%

Sumber: Profil Desa Sidoharjo 2011

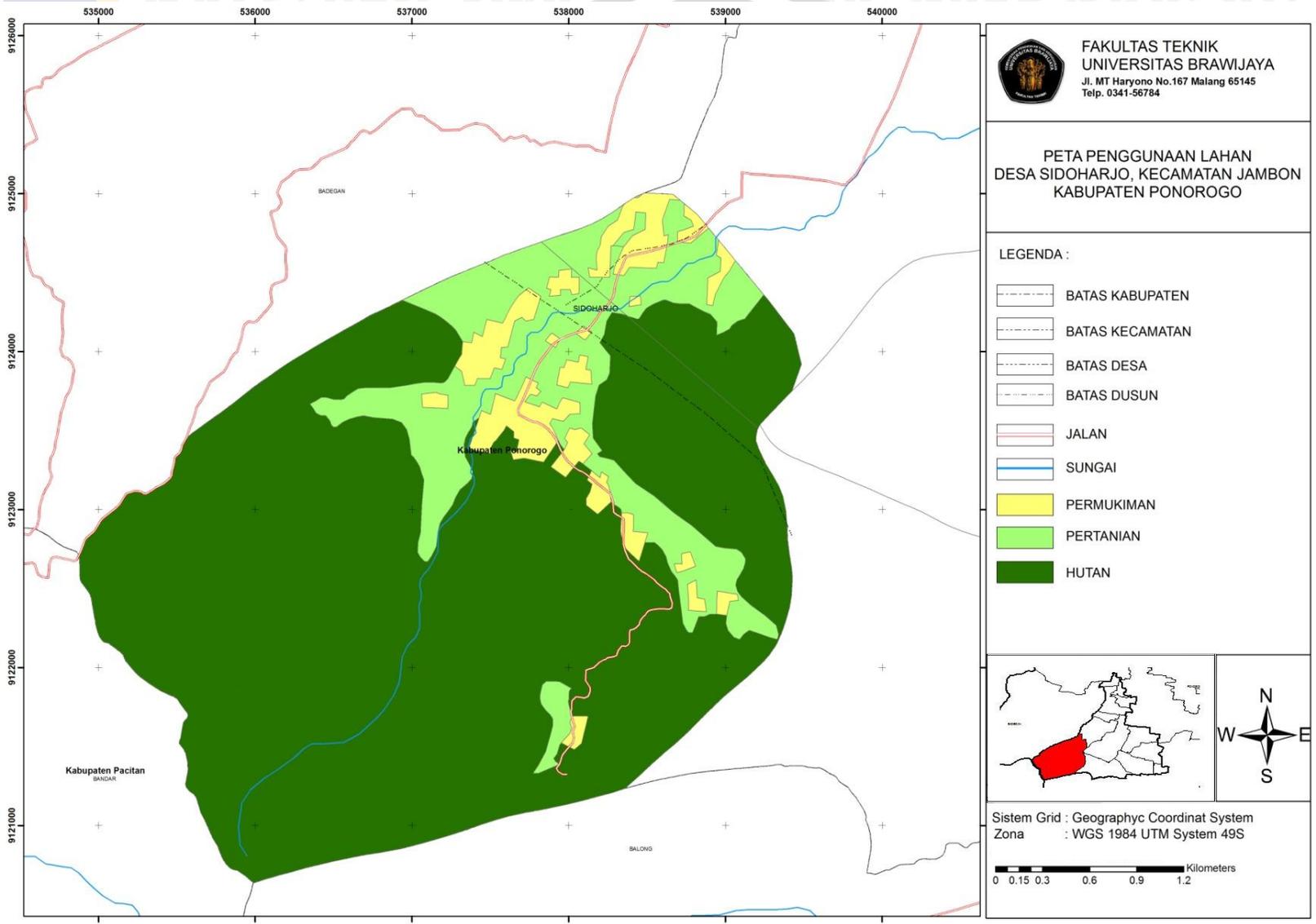
Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Sidoharjo adalah lahan hutan seluas 812,11 Ha dari keseluruhan total lahan. Sedangkan luas lahan permukiman adalah 111,63 Ha atau 9.15% dari total lahan. Penggunaan lahan dengan persentase terkecil adalah perkantoran yakni 0,63 Ha.

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat terlihat bahwa penggunaan tanah di Desa Sidoharjo didominasi dengan area lahan hutan dimana lahan hutan di Desa Sidoharjo terdiri atas Hutan lindung, hutan rakyat, dan hutan produksi.

Tabel 4.5 Luasan jenis hutan di Desa Sidoharjo

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Hutan Lindung	748,24	92,1%
2	Hutan Rakyat	50,00	6,2%
3	Hutan Produksi	13,87	1,7%
	Total	812,11	100%

Sumber: Profil Desa Sidoharjo 2011



Peta 4.1 Peta Tata Guna Lahan Desa Sidoharjo

4.3.2 Karakteristik Faktor-Faktor yang Berpengaruh di Desa Sidoharjo

A. Aksesibilitas

1. Keberadaan alat transportasi umum

Desa Sidoharjo dikelilingi oleh perbukitan. Akses desa menuju pusat kegiatan tidak ditunjang adanya transportasi umum yang menjangkau desa. Transportasi umum berupa angkot menjangkau hingga pasar kecamatan di Desa Jambon yang berjarak \pm 3 km. Hal ini membuat masyarakat harus memiliki kendaraan pribadi. Bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki kendaraan pribadi maka untuk mengakses pusat kecamatan Jambon dilakukan dengan berjalan kaki.

2. Orbitasi desa

Tabel 4.6 Orbitasi desa ke pusat kegiatan

No.	Uraian	Keterangan	Lama Tempuh
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	3 Km	15 Menit
2.	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota terdekat	18 Km	45menit -1 jam

Sumber: Profil Desa Sidoharjo 2011

Jarak Desa Sidoharjo ke Ibukota Kecamatan Jambon tergolong dekat yakni 3 km dengan estimasi waktu \pm 15 menit. Hal ini yang disebabkan tidak adanya akomodasi seperti angkutan umum sehingga masyarakat yang tidak memiliki kendaraan harus berjalan kaki ke pusat kegiatan di Desa Jambon.

Akses antar jalan utama antar dukuh dihubungkan oleh jalan dengan perkerasan aspal, makadam dan paving. Pusat Desa Sidoharjo terletak di Dukuh Karangsegon dengan dukuh terjauh yakni Dukuh Sidowayah.

3. Kondisi jalan

Berdasarkan Profil Desa Sidoharjo tahun 2011 luas jaringan jalan yang ada di Desa Sidoharjo mencapai 10Ha dengan kondisi jaringan jalan di Desa Sidoharjo yaitu 1,3 km dengan perkerasan aspal dimana 300 m dalam kondisi rusak; jalan makadam sepanjang 4 km; jalan paving sepanjang 2,3 km; dan selebihnya berupa jalan tanah



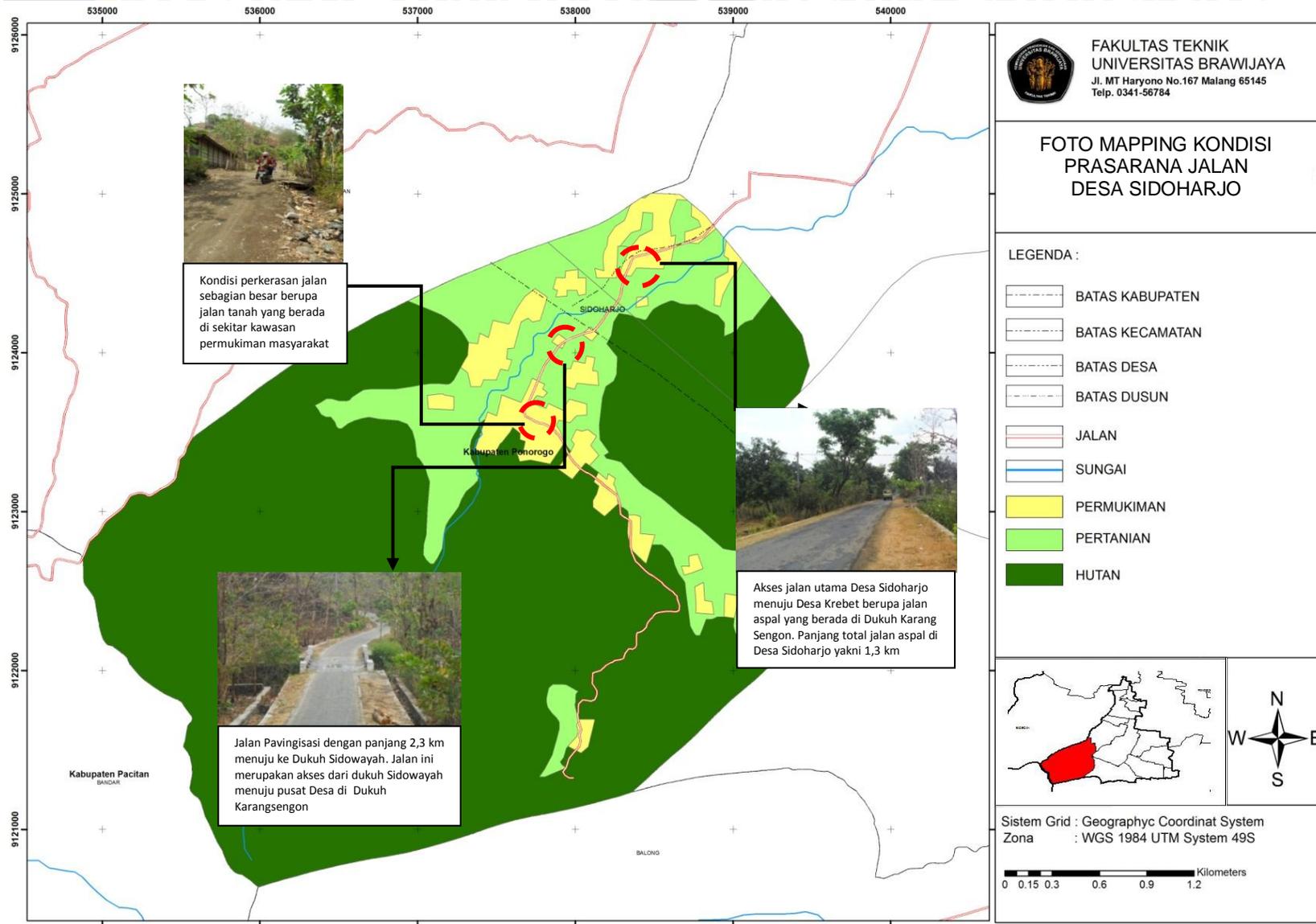
Gambar 4.3 Kondisi jalan Desa Sidoharjo

(a) Kondisi Jalan yang sudah di aspal, (b) kondisi perkerasan jalan, (c) Kondisi jalan desa yang belum ditalud

Kondisi akses jalan di Desa Sidoharjo belum sepenuhnya dalam kondisi yang baik. Banyak tepi jalan yang belum ditalud. Hal ini membuat badan jalan mudah tergerus erosi. Jalan desa akan becek ketika musim penghujan dan berlubang serta pendangkalan dan kemungkinan penyumbatan saluran air di tepi jalan.

Klasifikasi jalan di Desa Sidoharjo terdiri dari kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan lingkungan. Jalan kolektor sekunder di Desa Sidoharjo adalah jalan utama yang menghubungkan Desa Sidoharjo dengan desa lain disekitarnya. Misalnya jalan utama yang menghubungkan Desa Sidoharjo dengan Desa Kreet. Jalan lokal sekunder menghubungkan antara pusat-pusat lingkungan misalnya pusat lingkungan di Dukuh Karangsegon dengan pusat lingkungan permukiman atau antar lingkungan permukiman. Jalan lingkungan di Desa Sidoharjo adalah jalan desa yang menghubungkan jalan utama dengan permukiman di sekitarnya, menghubungkan antar permukiman maupun sebagai penghubung dari permukiman masyarakat menuju ke lahan pertanian maupun perkebunan.





Peta 4.2 MAPPING Kondisi Jalan Di Desa Sidoharjo

B. Potensi Kependudukan Desa

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidoharjo tergolong rendah. Wargamasyarakat berusia 10 tahun keatas yang masih buta huruf sejumlah 1570 orang, Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD sederajat terdapat 766 orang, yang tamat SD hanya 2162 orang, tamat SLTP 584 orang, SLTA berjumlah 102 orang, dan yang tamat D-3 berjumlah 3 orang. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diakibatkan masyarakat tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Tabel 4.7 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidoharjo

No	Keterangan	Jumlah
1	usia > 10 tahun Buta Huruf	1570
2	tidak tamat SD/sederajat	761
3	tamat SD /Sederajat	2234
4	tamat SLTP	602
5	tamat SLTA	106
6	tamat D – 3	3

Sumber: RPJM Desa Sidoharjo 2011-2015

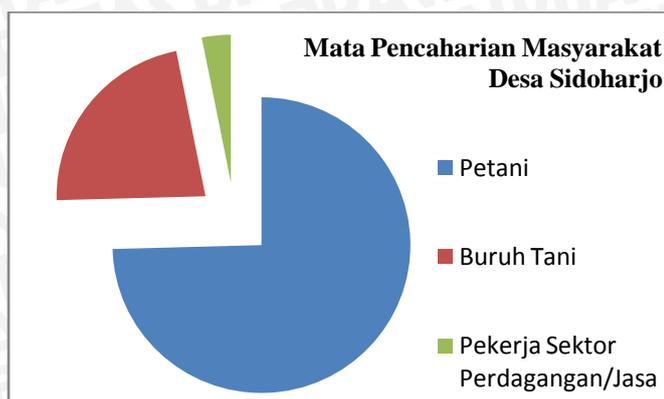
2. Mata Pencaharian

Pekerjaan utama penduduk di Desa Sidoharjo adalah bertani yakni sebesar 2424 orang. Selain itu, terdapat masyarakat yang berkerja di sektor Jasa/perdagangan sebesar 108 orang, dan 766 Angkatan Kerja tidak tamat SD/Sederajat sebagai buruh tani. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani disebabkan masyarakat tidak memiliki ketrampilan cukup dibidang lain. Jenis pekerjaan lain jumlahnya sangat kecil yaitu sebagai PNS, sopir, tukang kayu, tukang batu, kuli bangunan atau pebengkel.

Tabel 4.8 Mata pencaharian masyarakat Desa Sidoharjo

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	2.564 Orang	74,6%
2	Buruh Tani	766 Orang	22,3%
3.	Pekerja di Sektor Jasa/Perdagangan	108 Orang	3,1%
4.	Pekerja di Sektor Industri	- Orang	

Sumber: Profil Desa Sidoharjo 2011



Gambar 4.4 Mata pencaharian masyarakat Desa Sidoharjo

Masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa memiliki jumlah yang sedikit. Jenis pekerjaan dilakukan antara lain:

Tabel 4.9 Status mata pencaharian masyarakat desa di bidang perdagangan/jasa

No.	Status	Jumlah (Orang) Pemilik Pekerja
1.	Jasa Pemerintahan/Non Pemerintahan	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
	2). PNS	5 Orang
	3). TNI/POLRI	1 Orang
	4). Guru	2 Orang
c.	Pensiunan TNI/POLRI/Sipil	1 Orang
d.	Pegawai Swasta	3 Orang
2.	Jasa Perdagangan	
a.	Warung	19 Orang
b.	Kios/Toko	27 Orang
3.	Jasa Angkutan dan Transportasi	9 Orang
a.	Angkutan Bermotor	9 Orang
4.	Jasa Ketrampilan	
a.	Tukang Kayu	8 Orang
b.	Tukang Batu	17 Orang
c.	Tukang Jahit/Bordir	5 Orang
d.	Tukang Cukur	2 Orang
5.	Jasa Lainnya	
a.	Persewaan	2 Orang

Sumber: Profil Desa Sidoharjo 2011

3. Tingkat Harapan Hidup

Data administrasi yang ada di Desa Sidoharjo dimulai pada tahun 2009 sehingga data terkait kelahiran bayi serta kematian bayi di Desa Sidoharjo dimulai dari tahun 2009 hingga 2011.

Tabel 4.10 Angka kelahiran bayi di Desa Sidoharjo

Tahun	Kelahiran		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2009	17	15	32
2010	17	15	32
2011	20	17	37

Sumber: Kecamatan Jambon Dalam Angka 2012

Tabel 4.11 Angka kematian bayi di Desa Sidoharjo

Tahun	Kematian		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2009	14	11	25
2010	14	11	25
2011	1	4	4

Sumber: Kecamatan Jambon Dalam Angka 2012

C. Kemampuan Ekonomi Wilayah

1. Pertanian Desa

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa dengan penduduk bermata pencaharian utama sebagai petani. Pertanian yang berkembang di Desa Sidoharjo yakni Pertanian palawija. Wilayah desa yang berada di sekitar perbukitan kapur membuat tanah di Desa Sidoharjo kurang subur untuk pertanian. Desa Sidoharjo yang sering mengalami kekeringan membuat perkembangan padi sawah tidak sebaik tanaman palawija.

Tabel 4.12 Hasil pertanian Desa Sidoharjo

No	Tanaman	Luas (ha)	Hasil (ton/ha)
1	Jagung	524	5,1
2	Padi Sawah	40	4,2
3	Ubi Kayu	721	23
4	Kacang Hijau	20	1,3
5	Kedelai	130	1,4
6	Jeruk	17	0,3

Sumber: Profil Desa Sidoharjo tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.18 tanaman unggulan di Desa Sidoharjo yakni ubi kayu dengan hasil 23 ton perhektar. Besarnya hasil pertanian ini tidak didukung dengan peralatan yang dimiliki petani. Banyak masyarakat Desa Sidoharjo yang sengaja menanam ubi kayu di kebun mereka sebagai pengganti beras untuk kebutuhan pangan. Ubi kayu yang banyak ditanam di kebun/tegalan milik warga digunakan secara pribadi karena masyarakat kurang mampu untuk membeli beras sehingga ubi kayu tidak sepenuhnya di pasarkan ke daerah luar.

2. Ketersediaan Pusat Ekonomi

Desa Sidoharjo merupakan daerah pemekaran dari Desa Krebet pada tahun 2007. Hal ini mengakibatkan pembangunan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan lancar.



Gambar 4.5 Pasar terdekat di Desa Sidoharjo.

Pusat perekonomian terdekat di Desa Sidoharjo merupakan pasar yang berada di Desa Jambon dengan jarak tiga kilometer. Pasar terdekat di Desa Sidoharjo yakni pasar buatan yang berada di depan sekolah SDN 4 Kreet di Dukuh Karangsegon.

3. Fasilitas Umum

a. Pendidikan

Desa Sidoharjo memiliki beberapa fasilitas pendidikan diantaranya adalah 3 (Tiga) buah TK/RA/Rabata; 3 (Tiga) buah Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama. Fasilitas pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus telah ada Kelas Inklusi di SDN 04 Kreet. Berikut merupakan tabel keberadaan sarana pendidikan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4.13 Jumlah sarana pendidikan di Desa Sidoharjo

Fasilitas Pendidikan	TK	SD	SD Inklusi	SMP	SMA
Jumlah	3	2	1	1	-

Sumber: RPJM Desa Sidoharjo, 2011-2015

b. Perdagangan dan Jasa

Di Desa Sidoharjo terdapat beberapa fasilitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya adalah pasar desa. Keberadaan pasar desa kurang didukung dengan letak pasar yang berada di depan sekolah SDN 3 Kreet. Pembangunan pasar dibutuhkan untuk menampung pedagang, namun tidak adanya dana pembangunan pasar menyebabkan pasar bersifat seadanya.



Gambar 4.6 Kondisi pasar Desa Sidoharjo

Tabel 4.14 Jumlah fasilitas perekonomian di Desa Sidoharjo

Fasilitas Perekonomian	Pasar	Koperasi Gapoktan	Koperasi Wanita
Jumlah	1	2	1

Sumber: RPJM Desa Sidoharjo, 2011-2015

c. Kesehatan

Di Desa Sidoharjo terdapat satu buah Puskesmas Pembantu, dua orang Bidan Desa, seorang mantri kesehatan, Poskesdes, Posyandu dan Kader-kader Kesehatan Desa. Berikut merupakan rincian fasilitas kesehatan di Desa Sidoharjo;



Gambar 4.7 Puskesmas pembantu di Desa Sidoharjo

Tabel 4.15 Jumlah fasilitas kesehatan di Desa Sidoharjo

Fasilitas Kesehatan	Puskesmas Pembantu	Bidan Desa	Mantri kesehatan	Poskesdes	Posyandu	Kader-kader kesehatan
Jumlah	1	2	1	1	1	19

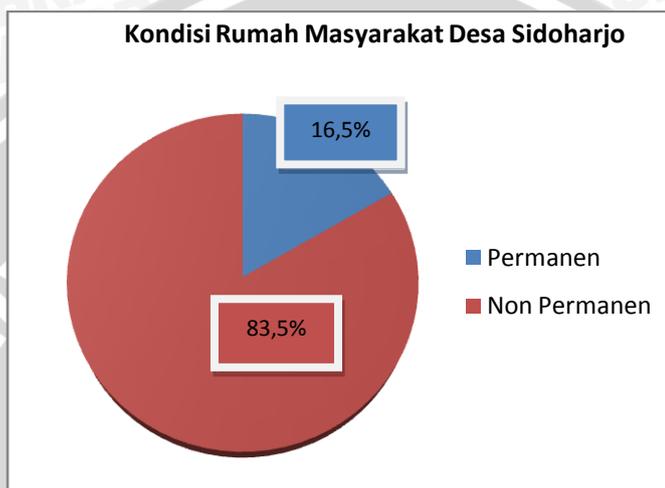
Sumber: RPJM Desa Sidoharjo, 2011-2015

Puskesmas pembantu yang ada di desa jarang aktif atau melayani masyarakat karena terbatasnya tenaga medis yang bertugas di Desa Sidoharjo. Petugas medis yakni mantri kesehatan hanya seminggu sekali berada di puskesmas pembantu.

D. Ketersediaan Sarana Prasarana

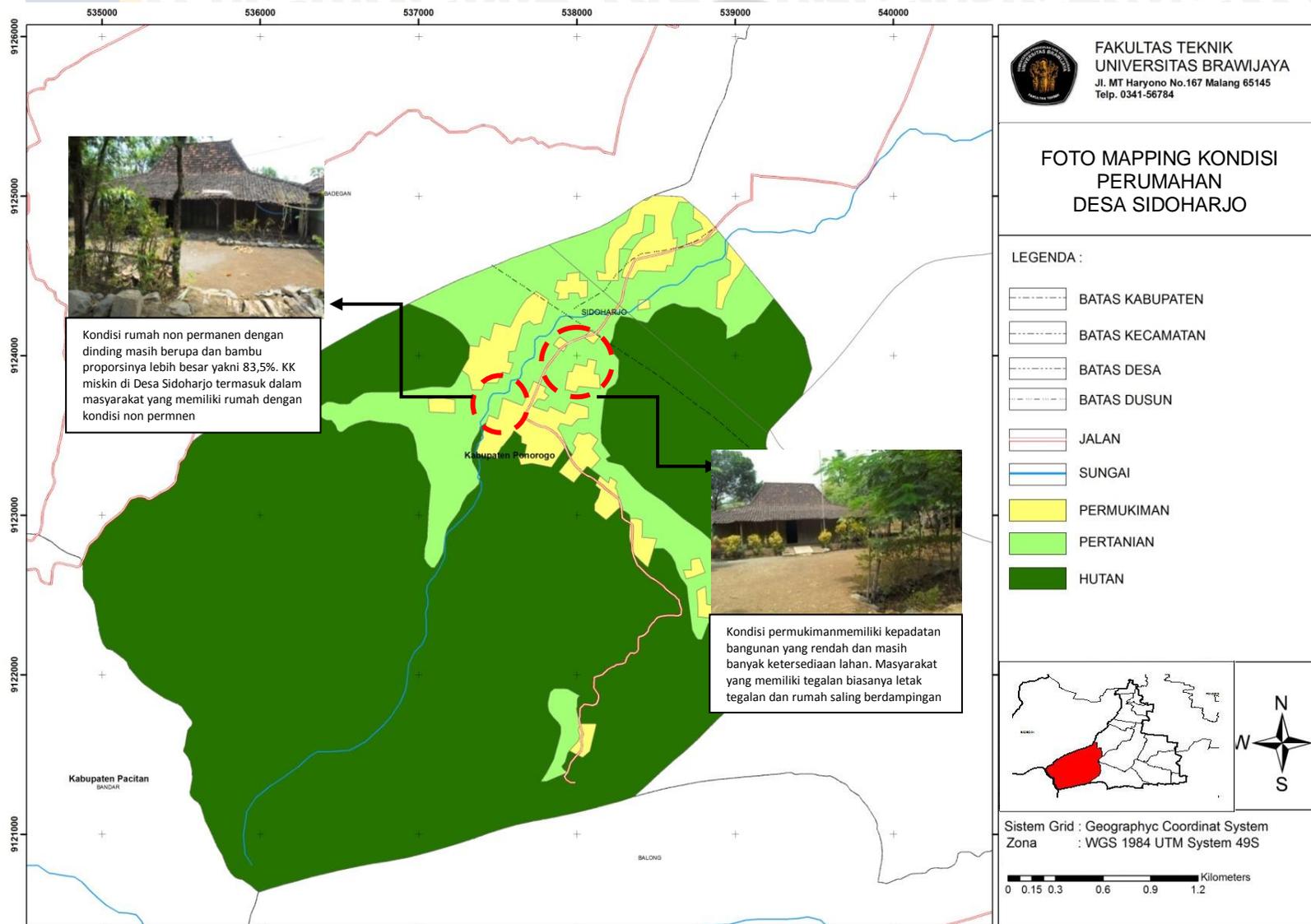
1. Kondisi Rumah

Berdasarkan Kecamatan Jambon dalam angka tahun 2012, pada tahun 2011 sarana perumahan yang tersedia pada Desa Sidoharjo sebanyak 1.329 unit rumah yang tersebar di 3 (tiga) wilayah dukuh. Kondisi rumah pada wilayah Desa Sidoharjo ini seluruhnya merupakan rumah yang dibangun/didirikan secara swadaya oleh penduduk.



Gambar 4.8 Prosentase kondisi rumah di Desa Sidoharjo

Rumah masyarakat di Desa Sidoharjo terdiri dari kondisi permanen dan non permanen dimana kondisi permanen yang memiliki dinding tembok proporsinya hanya sebesar 16,5% atau sebanyak 220 unit sementara rumah non permanen dengan dinding masih berupa dan bambu proporsinya lebih besar yakni 83,5% atau sebanyak 1.109 unit. Masyarakat yang memiliki rumah dalam kondisi non permanen termasuk dalam KK miskin desa. Besarnya prporsi rumahnya yang tidak permanen sebabkan oleh masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan permasalahan keterbelakangan mental juga termasuk dalam keluarga yang memiliki rumah dalam kondisi non permanen.



Peta 4.3 MAPPING Kondisi Rumah di Desa Sidoharjo

2. Air Bersih

Sistem air bersih di Desa Sidoharjo menggunakan saluran perpipaan dan non-perpipaan. Untuk sistem non perpipaan sumber air berasal dari individu kk yakni menggunakan sumur gali. Sedangkan saluran perpipaan merupakan sambungan yang berasal dari sumber mata air. Kualitas air sumur dan sumber mata air yang dikonsumsi oleh penduduk relatif baik dengan indikator bahwa air tersebut tidak berbau dan tidak berwarna.



Gambar 4.9 Kondisi Penyaluran air Bersih

Sebanyak 65% penduduk atau 1041 KK menggunakan sumur, 35% atau 560 KK menggunakan sumber mata air. Pemenuhan sumber air bersih di Desa Sidoharjo berasal dari sumber air bersih Gunung Khud, Mbedok, Ndawe, namun pada kondisi eksisting pemenuhan air bersih berasal dari 4 sumber mata air masih kurang memenuhi kuantitas kebutuhan 35% penduduk yang menggunakan sumber mata air di beberapa RT di Dukuh Sidowayah.

Proses pendistribusian air bersih di Desa Sidoharjo antara lain sumber mata air yang berjumlah empat, yang pertama berasal dari dua sumber air Gunung Khud yang ditransmisikan menuju tandon di hutan lindung disekitar dukuh Sidowayah, sedangkan sumber kedua berasal dari mata air Mbedok dan Ndawe. Dari tandon di hutan lindung dan mata air, langsung menuju ke tandon di Dukuh Klitik dan Dukuh Karangsegon. Dari tandon utama ada yang menuju ke tandon-tandon kecil di dukuh Karangsegon dan Klitik, serta ada yang langsung ke MCK umum dan rumah-rumah warga. Air yang berasal dari tandon kecil langsung didistribusikan menuju ke MCK dan rumah-rumah warga.

3. Sanitasi

Prasarana sanitasi yang terdapat pada lingkungan Desa Sidoharjo meliputi sanitasi pribadi (kamar mandi, jamban, dan cubluk) serta badan air (sungai dan mata air). Masyarakat atau rumah tangga yang menggunakan prasarana sanitasi pribadi berupa cubluk memiliki proporsi sebesar 70% atau 1121 KK, penduduk

atau rumah tangga yang menggunakan jamban sebanyak 25% atau 400 KK, sementara masih penduduk yang masih melakukan aktivitas mandi, cuci dan memasak pada sungai memiliki proporsi sebesar 5% atau sebanyak 80 KK.

4. Jaringan Listrik

Kebutuhan listrik di Desa Sidoharjo dipasok oleh PLN dimana hampir seluruh desa Sidoharjo secara merata teraliri listrik. Pemenuhan listrik di Dukuh Klitik dan Dukuh Karangsegon telah tercukupi secara merata namun untuk Dukuh Sidowayah terdapat dua RT yang belum dialiri listrik yakni RT 4 dan RT 11. Hal ini disebabkan kabel PLN sulit menjangkau RT 4 dan RT 11. Selama ini masyarakat di kedua RT tersebut memanfaatkan tenaga diesel untuk pemenuhan kebutuhan listrik.

5. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan komunikasi memberikan kontribusi bagi masyarakat Desa Sidoharjo dalam memenuhi kebutuhan komunikasi. Lokasi Desa Sidoharjo yang terletak cukup jauh dari pusat Kabupaten Ponorogo serta wilayahnya yang dikelilingi perbukitan membuat biaya yang dibutuhkan untuk memasang kabel telepon menjadi mahal. Akses jalan yang jauh membuat pihak pemerintah maupun swasta kurang berminat mengembangkan jaringan telekomunikasi di Desa Sidoharjo.

4.4 Karakteristik Program Bantuan di Desa Sidoharjo

4.4.1 Jenis Bantuan Pemerintah

Desa Sidoharjo merupakan wilayah pemekaran desa dari Desa Kreet. Desa Sidoharjo berdiri sejak tahun 2007 namun administrasi desa berjalan sejak tahun 2009 sehingga bantuan yang masuk masih dibawah desa Kreet hingga tahun 2007.

Tabel 4.16 Program bantuan yang masuk Desa Sidoharjo

No	Tahun	Program/ Bantuan yang diterima	Kelompok sararan	Asal Bantuan	Keterangan
1.	2007	Beras Miskin	RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas	Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Ponorogo	Pemberian Raskin rutin untuk KK dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental sebesar 3 kg tiap bulannya.
		Pembangunan talud jalan	Masyarakat Desa Sidoharjo	PNPM Melalui program PPK (Program Pengembangan Kecamatan)	Jalan yang ditalud sepanjang 195 m di dukuh Klitik dengan pengerjaan selama 45 hari. Total danan sumbangan yakni Rp 78.125.500,-
		Bantuan	Masyarakat	Anggaran	Bantuan diberikan untuk

No	Tahun	Program/ Bantuan yang diterima	Kelompok sararan	Asal Bantuan	Keterangan
		Operasional Sekolah	Desa Sidoharjo yang sedang bersekolah	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	sekolah dasar (SD) yang ada di Desa Sidoharjo untuk meningkatkan minat/antusiasme masyarakat untuk bersekolah/menerima pendidikan karena selamaini masyarakat Desa Sidoharjo enggan bersekolah dan memilih bekerja
2.	2008	Beras Miskin	RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas	Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Ponorogo	Pemberian Raskin rutin untuk KK dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental sebesar 3 kg tiap bulannya.
		Garam yodium	KK Desa Sidoharjo khususnya ibu hamil dan ODK di Desa Sidoharjo	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigras Kabupaten Ponorogo	Pemberian bantuan diberikan pada masyarakat dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental. Selain itu garam yodium diberikan pula untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Desa Sidoharjo.
		Bantuan Operasional Sekolah	Masyarakat Desa Sidoharjo yang sedang bersekolah	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	Bantuan diberikan untuk sekolah dasar (SD) yang ada di Desa Sidoharjo untuk meningkatkan minat/antusiasme masyarakat untuk bersekolah/menerima pendidikan karena selamaini masyarakat Desa Sidoharjo enggan bersekolah dan memilih bekerja
3.	2009	Beras Miskin (Raskin)	RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas	Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Ponorogo	Pemberian Raskin rutin untuk KK dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental sebesar 3 kg tiap bulannya.
		Pemberian Garam Yodium	KK Desa Sidoharjo khususnya ibu hamil dan ODK di Desa Sidoharjo	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigras Kabupaten Ponorogo	Sama halnya dengan pemberian garam yodium yang dilakukan pada tahun sebelumnya yakni pemberian dikhususkan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan masyarakat pada umumnya.
		Bantuan Operasional Sekolah	Masyarakat Desa Sidoharjo yang sedang bersekolah	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	Bantuan diberikan untuk sekolah dasar (SD) yang ada di Desa Sidoharjo untuk meningkatkan minat/antusiasme masyarakat untuk bersekolah/menerima

No	Tahun	Program/ Bantuan yang diterima	Kelompok sararan	Asal Bantuan	Keterangan
4.	2010	Beras Miskin	RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas	Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Ponorogo	pendidikan karena selamaini masyarakat Desa Sidoharjo enggan bersekolah dan memilih bekerja Pemberian Raskin rutim untuk KK dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental sebesar 3 kg tiap bulannya.
		Pemberian Garam Yodium	KK Desa Sidoharjo khususnya ibu hamil dan ODK di Desa Sidoharjo	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigras Kabupaten Ponorogo	Pemberian dikhususkan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan masyarakat pada umumnya.
		Bantuan Operasional Sekolah	Masyarakat Desa Sidoharjo yang sedang bersekolah	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	Bantuan ini rutin diberikan untuk sekolah dasar (SD) yang ada di Desa Sidoharjo untuk meningkatkan minat/antusiasme masyarakat untuk bersekolah/menerima pendidikan karena selamaini masyarakat Desa Sidoharjo enggan bersekolah dan memilih bekerja
		Pembangunan Gedung TK	Anak-anak di Desa Sidoharjo yang sedang bersekolah	Dinas PU Kabupaten Ponorogo	Pemberian Bantuan dilaksanakan bekerjasama dengan PNPM Mandiri Desa. Pembangunan di laksanakan di sekitar Balai Desa Sidoharjo di Dukuh Karangsengon. Dana yang diberikan yakni Rp 118.881.000,-
		Pembuatan Bangunan Pos Jaga Kebakaran Hutan	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo	Pembangunan pos jaga kebakaran dilakukan di lima desa yakni di Desa Karangpatihan dan Pandak Kec. Balong, Desa Sidoharjo Kec. Jambon, Desa Pupus Kec.Ngebel dan Desa Maguan Kec.Maguan Kec.Sambit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan yang sering terjadi di sekitar desa-desa tersebut.
5.	2011	Beras Miskin	RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas	Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Ponorogo	Pemberian Raskin rutim untuk KK dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental sebesar 3 kg tiap bulannya.
		Pemberian	KK Desa	Dinas Sosial	Permebrian garam yodium

No	Tahun	Program/ Bantuan yang diterima	Kelompok sararan	Asal Bantuan	Keterangan
		Garam Yodium	Sidoharjo khususnya ibu hamil dan ODK di Desa Sidoharjo	dan Tenaga Kerja Transmigras Kabupaten Ponorogo	secara rutin sebagai upaya dalam perbaikan gizi masyarakat desa yang dianggap masih belum memenuhi.
		Bantuan Operasional Sekolah	Masyarakat Desa Sidoharjo yang sedang bersekolah	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	Bantuan diberikan untuk sekolah dasar (SD) yang ada di Desa Sidoharjo untuk meningkatkan minat/antusiasme masyarakat untuk bersekolah/menerima pendidikan karena selain ini masyarakat Desa Sidoharjo enggan bersekolah dan memilih bekerja
		Pengerasan Jalan/Pavingisasi jalan di Dukuh Sidowayah	Masyarakat Desa Sidoharjo khususnya di Dukuh Sidoharjo	Dinas PU Kabupaten Ponorogo	Upaya pengerasan jalan dilakukan untuk mempelancar aktivitas masyarakat. Penanganan dilakukan melalui PNPM Mandiri Infrastruktur Pedesaan yang memberikan bantuan pembangunan akses transportasi desa.
		Pemberian bantuan makanan	KK miskin Desa Sidoharjo yang memiliki anggota keluarga ODK/ Down syndrom	Kajati Provinsi Jawa Timur	Program bantuan Beurpa Makanan instant yakni mie instant dan biscuit serta uang tunai Rp 2.000.000,-
		Paket Sembako	KK miskin Desa Sidoharjo yang memiliki anggota keluarga ODK/ Down syndrom	Perum Bulog Subdivi Kabupaten Ponorogo	Pemberian bantuan berupa 200 Paket sembako dan Pakaian layak pakai
		Penyuluhan Kegiatan Pengolahan Limbah Ternak	Masyarakat Desa Sidoharjo yang berkerja sebagai peternak maupun memiliki hewan ternak	Perhiptani (Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Dinas Pertanian))	Program dimaksudkan agar masyarakat desa Sidoharjo lebih memperhatikan buangan limbah ternak untuk dimanfaatkan kembali.
		Penyuluhan Bertanam secara vertikultur	Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani	Perhiptani (Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Dinas Pertanian))	Program penyuluhan dilakukan untuk menambah wawasan petani di Desa Sidoharjo dalam metode bertani
		Bantuan mangga dan Blimbing	Masyarakat Desa Sidoharjo yang memiliki kebun	Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo	Bantuan ditujukan agar masyarakat dapat memperluas kegiatan pertanian jenis buah-

No	Tahun	Program/ Bantuan yang diterima	Kelompok sararan	Asal Bantuan	Keterangan
		Bantuan modal pertanian, pupuk dan benih padi	Masyarakat Desa Sidoharjo yang memiliki kebun serta kekurangan modal	Dinas Pertanian	buah-buahan pemberian bantuan ditujukan untuk para petani Desa Sidoharjo yang mengalami kekurangan modal dan bertujuan untuk mengantusiasme masyarakat untuk bertani
		Bantuan Makanan	KK miskin Desa Sidoharjo yang memiliki anggota keluarga ODK/ Down syndrom	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Ponorogo	Bantuan diberikan pada masyarakat keterbelakangan mental di enam desa yakni Desa Kreet Kecamatan Jambon, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, Desa Dayakan Kecamatan Badegan, Desa Pandak Kecamatan Balong, Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Paringan Kecamatan Jenangan.
		Bantuan Makanan Saji	Masyarakat keterbelakangan mental dan ODK	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Ponorogo	Bantuan rutin diberikan setiap hari di Rumah Kasih Sayang yakni bantuan makanan bagi masyarakat keterbelakangan mental di Desa Kreet dan Desa Sidoharjo.
		bantuan pemberdayaan bibit ternak kambing	KK miskin di Desa Sidoharjo yang tidak miliki modal serta keterampilan untuk bekerja	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Bantuan di berikan pada desa dengan tingkat perekonomian rendah, antara lain Desa Pandak (kec.Balong), Desa Sidoharjo dan Kreet (Kec.Jambon), desa Kemiri, Mrician, Tanjung Sari dan Paringan (kec.Jenangan). Bantuan dibagi berdasarkan jumlah kelompok KUBE yang ada di desa masing-masing. Dari 560 KK atau 56 KUBE (Kelompok Usaha Bersama), masing-masing KUBE menerima 11 ekor kambing (10 ekor betina dan 1 ekor pejantan)
6.	2012	Pemberian Garam Yodium	KK Desa Sidoharjo khususnya ibu hamil dan ODK di Desa Sidoharjo	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Ponorogo	Permebrian garam yodium sebagai upaya dalam perbaikan gizi masyarakat desa yang dianggap masih belum memenuhi.
		Beras Miskin	RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas	Kantor Pertahanan Pangan Kabupaten Ponorogo	Pemberian Raskin rutim untuk KK dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental sebesar 3 kg tiap bulannya.

No	Tahun	Program/ Bantuan yang diterima	Kelompok sararan	Asal Bantuan	Keterangan
		Bantuan Operasional Sekolah	Masyarakat Desa Sidoharjo yang sedang bersekolah	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	Bantuan diberikan untuk sekolah dasar (SD) yang ada di Desa Sidoharjo untuk meningkatkan minat/antusiasme masyarakat untuk bersekolah/menerima pendidikan karena selamaini masyarakat Desa Sidoharjo enggan bersekolah dan memilih bekerja
		Bantuan Makanan Saji	Masyarakat keterbelakangan mental dan ODK	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Ponorogo	Melanjutkan bantuan dari tahun 2011, bantuan ini rutin diberikan setiap hari di Rumah Kasih Sayang yakni bantuan makanan bagi masyarakat keterbelakangan mental di Desa Kreet dan Desa Sidoharjo. Namun terjadi penurunan dana yang diberikan dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Ponorogo diakibatkan bantuan dari pemerintah Provinsi diberhentikan
		Rumah Kasih Sayang (Rumah tempat pengembangan keterampilan bagi masyarakat down syndrome)	Masyarakat down syndrome di Desa Kreet dan Desa Sidoharjo	Kementerian Sosial	Program tersebut diresmikan pada pertengahan tahun 2011 di Desa Kreet. Pada awal tahun 2012, Desa Sidoharjo bergabung dengan program tersebut)
		Bantuan dana operasioanl kebutuhan program RKS	Masyarakat down syndrome anggota program RKS di Desa Kreet dan Desa Sidoharjo	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Bantuan telah diberikan sejak berdirinya program RKS pada tahun 2011, namun masyarakat down syndrome Desa Sidoharjo bergabung pada awal tahun 2012
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ke 100 orang di Desa Kreet dan Sidoharjo, hewan ternak kambing, peralatan ternak, paket sembako	KK miskin di Desa Sidoharjo khususnya KK dengan anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental maupun ODK	Kementerian Sosial	Pemberian ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoharjo, Pemberian hewan ternak sejumlah 200 ekor diserahkan secara simbolik oleh Menteri Sosial secara langsung pada pejabat desa.
		Bantuan makanan berupa beras dan susu	Masyarakat keterbelakangan mental dan ODK	PKK Jatim dan Dirjen Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI	Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur pada pemerintah Desa Sidoharjo dan pengurus RKS

Sumber: Hasil Wawancara 2012

4.4.2 Klasifikasi Bantuan

Berdasarkan bantuan yang masuk desa Sidoharjo, bantuan dapat dikelompokkan berdasarkan tiga jalur strategi pembangunan yakni:

1. Klaster I
 - 1) Program Keluarga Harapan
 - 2) Bantuan Operasional Sekolah
 - 3) Program Bantuan Siswa Miskin
 - 4) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 5) Program Beras Untuk Keluarga Miskin

Program pada klaster pertama ditekankan pada pendidikan dan kesehatan keluarga masyarakat. Hal ini ditunjang dengan pengklasifikasian program yang mengutamakan pendidikan masyarakat. Tujuan dari program pengentasan kemiskinan klaster I yakni mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi (pelayanan fasilitas dan sarana prasarana). Berdasarkan bantuan maupun program yang masuk ke Desa Sidoharjo, yang termasuk klasifikasi klaster I yakni:

- 1) Program Operasional Sekolah
- 2) Program Beras Untuk Keluarga Miskin

Bantuan tersebut rutin diberikan oleh pemerintah daerah untuk desa-desa miskin tertinggal di Kabupaten Ponorogo termasuk Desa Sidoharjo. Selain itu terdapat bantuan-bantuan yang diberikan ketika Desa Sidoharjo mulai disorot dengan adanya masyarakat down syndrome di desa tersebut. Bantuan tersebut antara lain

- 1) Pembangunan talud jalan
PNPM Melalui program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) Pengerjaan dilakukan di Dukuh Klitik, Desa Sidoharjo pada tahun 2008.
- 2) Bantuan makanan
Bantuan berasal dari Kajati Provinsi Jawa Timur yakni berupa Makanan instant yakni mie instant dan biscuit serta uang tunai Rp 2.000,000,-
- 3) Paket sembako
Bantuan berasal dari bantuan Perum Bulog Subdive Kabupaten Ponorogo
- 4) Bantuan Makanan Siap Saji

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Ponorogo. Bantuan rutin diberikan setiap hari di Rumah Kasih Sayang yakni bantuan makanan bagi masyarakat keterbelakangan mental di Desa Kreet dan Desa Sidoharjo.

5) Bantuan makanan berupa beras dan susu

PKK Jatim dan Dirjen Bina Gizi Kementrian Kesehatan RI

Bantuan-bantuan berupa makanan serta sembako dari berbagai pihak tersebut diutamakan untuk KK miskin yang memiliki anggota keluarga yang mengalami down syndrome.

6) Pengerasan Jalan/Pavingisasi jalan di Dukuh Sidowayah

Program yang diadakan melalui PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan dilakukan di Dukuh Sidowayah pada tahun 2011

7) Bantuan dana modal kebutuhan program RKS

Kementrian Sosial RI

Bantuan berupa biaya operasional untuk membantu berjalannya kelembagaan yang mengurus program RKS. Dana operasional diperuntukkan untuk mencukupi pembuatan makanan siap saji yang biasanya dibuat untuk masyarakat down syndrome di Desa Kreet dan Desa Sidowayah

2. Klaster II

1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

Program pada klaster ke dua ditekankan pada pengembangan/pembangunan desa baik dari segi pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan program bantuan yang pernah masuk ke Desa Sidoharjo yang termasuk dalam klaster II yakni:

1) Pembangunan Gedung TK

Pemberian Bantuan dilaksanakan bekerjasama PNPM Mandiri Desa dengan swadaya masyarakat Desa Sidoharjo pada tahun 2010 .

2) Penyuluhan Kegiatan Pengolahan Limbah Ternak

Penyuluhan dilakukan oleh Perhptani Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kualitas petani di Desa Sidoharjo

3) Penyuluhan Bertanam secara vertikultur

Penyuluhan dilakukan oleh Perhiptani Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Program penyuluhan dilakukan untuk menambah wawasan petani di Desa Sidoharjo dalam metode bertani

4) Bantuan Bibit mangga dan Blimbing

Penyuluhan dilakukan oleh Perhiptani Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Bantuan ini diberikan sebagai modal perluasan jenis tanaman yang dapat ditanam di Desa Sidoharjo selain tanaman palawija dan padi sawah.

5) Rumah Kasih Sayang (RKS)

Didirikan mulai tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011 berpusat di Desa Kreet oleh Kementrian Sosial. Pada awal tahun 2012 masyarakat down syndrome di Desa Sidoharjo bergabung menjadi anggota dalam program RKS. Program terus berjalan dalam pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigras Kabupaten Ponorogo.

3. Klaster III

1) Kredit Usaha Rakyat

2) Kredit Usaha Bersama

Pada program bantuan ke tiga ditekankan pada pengembangan perekonomian suatu daerah. Hal ini terlihat dari program pemerintah yang lebih mengutamakan pemberian modal usaha untuk masyarakat. Berdasarkan program bantuan yang pernah masuk ke Desa Sidoharjo yang termasuk dalam klaster III yakni:

1) Bantuan modal pertanian, pupuk dan benih padi

2) bantuan pemberdayaan bibit ternak kambing

3) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ke 100 orang di Desa Kreet dan Sidoharjo, hewan ternak kambing, peralatan ternak, paket sembako

Bantuan modal yang diberikan pemerintah diberikan melalui program KUBE yang ada di Desa Sidoharjo. Tujuan Program KUBE yakni memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

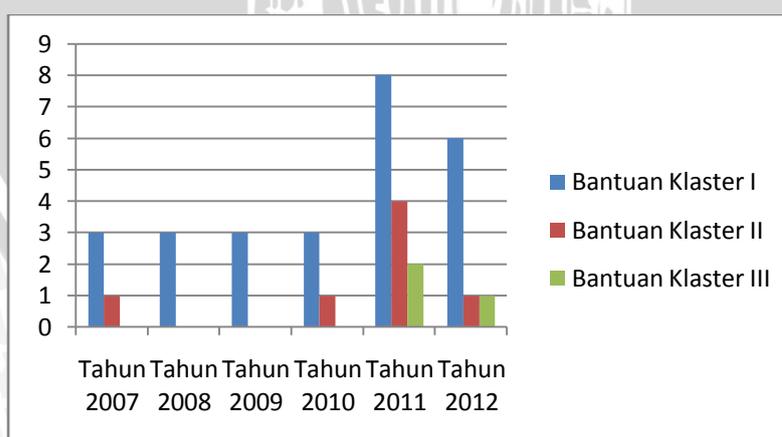
Tabel 4.17 Klasifikasi program bantuan Desa Sidoharjo

No	Klaster	Program/Bantuan	Tahun Pelaksanaan
1.	Klaster I Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	Program Operasional Sekolah	2007,2008,2009,2010,2011,2012
		Program Beras Untuk Keluarga Miskin	2007,2008,2009,2010,2011,2012
		Pembangunan talud jalan	2007
		Garam Yodium	2008,2009,2010,2011,2012
		Pengerasan Jalan/Pavingisasi jalan di Dukuh Sidowayah	2011
		Pemberian bantuan makanan	2011
		Paket Sembako	2011
		Bantuan Makanan	2011
		Bantuan Makanan Siap Saji	2011, 2012
		Bantuan makanan berupa beras dan susu	2012
2.	Klaster II Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan dana operasional program RKS	2012
		Pembangunan Gedung TK	2010
		Penyuluhan Kegiatan Pengolahan Limbah Ternak	2011
		Penyuluhan Bertanam secara vertikultur	2011
		Bantuan Bibit mangga dan Blimbing	2011
		Rumah Kasih Sayang	2012
3.	Klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	Bantuan modal pertanian, pupuk dan benih padi	2011
		bantuan pemberdayaan bibit ternak kambing	2011
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ke 100 orang di Desa Krebet dan Sidoharjo, hewan ternak kambing, peralatan ternak, paket sembako	2012

Sumber: Hasil Analisis 2013

4.4.3 Trend Pemberian Bantuan Pemerintah

Bantuan yang diberikan Pemerintah pada Desa Sidoharjo dapat diklasifikasikan menjadi tiga klaster berdasarkan program pengentasan kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Berdasarkan Tabel 4.22, trend pemberian bantuan pemerintah ke Desa Sidoharjo dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 4.10 Grafik trend pemberian bantuan pemerintah ke Desa Sidoharjo Tahun 2007-2012

Berdasarkan grafik 4.1 terkait trend pemberian bantuan pemerintah ke Desa Sidoharjo dari tahun 2008 hingga 2012 terjadi kontinuitas terhadap bantuan klaster I

yakni pemberian beras miskin dan bantuan operasional sekolah. Kedua bantuan tersebut diberikan secara rutin ke Desa Sidoharjo sejak sebelum terjadi pemekaran yakni ketika Desa Sidoharjo masih termasuk dalam Desa Kreet. Ketika Desa Sidoharjo mendapat sorotan dari masyarakat luas terkait keberadaan masyarakat down syndrome, bantuan yang diberikan berupa sembako dan pangan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2011.

Program bantuan klaster II terlihat mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011. Hal ini disebabkan karena Desa Sidoharjo mulai mendapatkan banyak sorotan oleh masyarakat secara luas dan pemerintah daerah maupun pusat terkait keberadaan masyarakat down syndrome maupun masyarakat penyandang cacat yang berjumlah ± 352 orang. Bantuan mulai masuk ke Desa Sidoharjo baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

Program bantuan yang terus mengalir membuat masyarakat semakin terbiasa dengan adanya bantuan. Hal ini berdampak kurang baik untuk pola pikir masyarakat yang hanya mengandalkan bantuan saja. Hal ini harus diimbangi oleh pelatihan ketrampilan agar masyarakat lebih mandiri. Bantuan klaster II mulai diberikan pemerintah untuk tujuan pemberdayaan dan pengembangan ketrampilan masyarakat serta penunjang akses pemberdayaan dengan bantuan pembangunan akses jalan.

Bantuan klaster III mulai diberikan pemerintah pada masyarakat Desa Sidoharjo untuk memulai program pemberdayaan dengan pemberian bantuan modal pertanian hingga bantuan modal hewan ternak serta sarana peralatan ternak.

Pada tahun 2012 bantuan pada tiap klaster mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada bantuan klaster I yang bersifat konsumtif, bantuan tersebut tidak bersifat *continue* atau rutin diberikan. Program bantuan dari Provinsi Jawa Timur tidak dilanjutkan pada tahun 2012 serta bantuan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu pada awal tahun 2012, Desa Sidoharjo bergabung dengan program RKS di Desa Kreet sehingga bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif terfokuskan ke lembaga RKS di Desa Kreet.

4.4.4 Analisis Evaluasi Program Bantuan Desa

Tujuan untuk mengevaluasi program bantuan yakni untuk mengetahui terapan pelaksanaan bantuan serta memberikan rekomendasi solusi pemecahan masalah. Hal ini disebabkan meski Desa Sidoharjo sering mendapat bantuan, masyarakat desa tidak sepenuhnya merasakan dampak dari bantuan tersebut. Hal ini dapat disebabkan salah

satunya pola pikir masyarakat yang belum berkembang sehingga tidak ada tindak lanjut setelah bantuan diberikan.

Pada tahap menilai keberhasilan sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan beberapa aspek. Indikator yang digunakan antara lain (Dunn, 2003):

1. Efektivitas

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah bantuan yang diberikan telah mencapai hasil yang diinginkan.

2. Kecukupan

Kriteria ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai telah memecahkan masalah yang dihadapi saat ini. Sehingga untuk kriteria ini digunakan untuk mengetahui hasil yang telah diperoleh dari bantuan yang masuk di Desa Sidoharjo

3. Pemerataan

Kriteria ini digunakan untuk menunjukkan pemerataan pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang berbeda.

4. Responsivitas

Kriteria ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap program bantuan yang diterima.

5. Ketepatan

Kriteria ini menunjukkan hubungan dengan dengan pemanfaatan program. Kriteria ini tidak hanya memiliki hubungan dengan satu kriteria namun lebih. Ketepatan merujuk pada nilai tujuan suatu program.

Tahapan adopsi kebijakan program bantuan merupakan tahap dalam mengimplementasikan suatu program. Pada tahapan evaluasi program menggunakan kelima kriteria kinerja kebijakan selanjutnya dapat diketahui keberhasilan implementasi suatu program di Desa Sidoharjo.

Tabel 4.18 Syarat penialain evaluasi program bantuan

Parameter	Kriteria	Rating
Efektivitas	penerapan program terlaksana (sesuai dengan tujuan program)	3
	Penerapan program terlaksana tidak sesuai tujuan program	2
	Program tidak berjalan	1
Kecukupan	dapat menangani permasalahan yang ada jangka panjang	3
	dapat menangani sebagian permasalahan yang ada dalam jangka pendek	2
	tidak dapat menangani permasalahan yang ada	1
Pemerataan	pemerataan sasaran bantuan telah terbagi sesuai sasaran program	2
	bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran program	1
Respon	Baik	3
	Cukup	2
	Kurang	1
Ketepatan	ketepatan tujuan program tercapai	3
	ketepatan tujuan program cukup	2
	ketepatan tujuan program kurang	1

Sumber: Modifikasi Muhammad at All (2000) dan Dunn (2003)

Nilai Pencapaian akhir program =

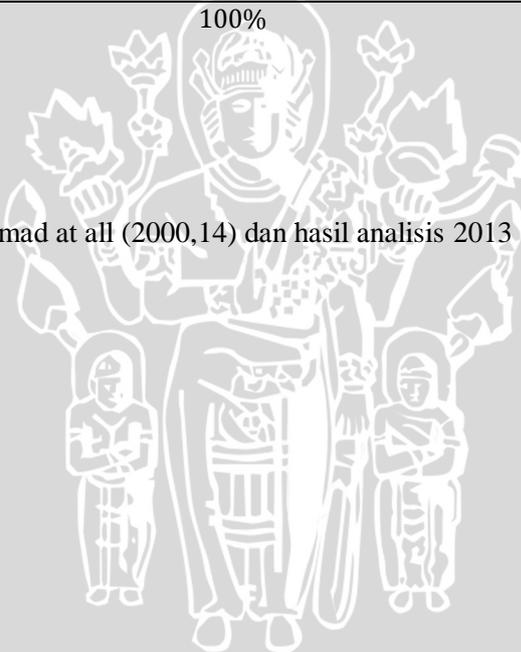
$$\frac{(\text{Nilai total rating} \times \text{nilai konstanta}) \times \text{bobot kegiatan}}{100\%}$$

Keterangan:

Nilai konstanta = 7,1

Bobot kegiatan = 100%

Sumber: Modifikasi Muhammad at all (2000,14) dan hasil analisis 2013



Tabel 4.19 Evaluasi Implementasi Program Bantuan Desa Sidoharjo

Klaster	Program Bantuan	Implementasi	Efektivitas	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	Skor	Nilai total rating x nilai konstanta	Bobot Kegiatan (%)	Nilai akhir pencapaian program
Klaster I Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	Program Operasional Sekolah	Dua Sekolah Dasar, Satu SD Inklusi, satu SMP di Desa Sidoharjo telah menerima bantuan dana BOS	2	3	2	1	2	10	71	100	71
	Program Beras Untuk Keluarga Miskin	Beras yang diterima KK miskin di Desa Sidoharjo kurang sesuai dengan takaran yang seharusnya. dari seharusnya 15kg. Hal ini dilakukan untuk meratakan bantuan ke KK miskin yang tak terdaftar sebagai penerima bantuan Raskin	2	1	1	1	1	6	42,6	100	42,6
	Garam Yodium	Bantuan diberikan pada KK miskin yang memiliki anggota keluarga down syndrome	2	1	1	2	1	7	49,7	100	49,7
	Pemberian bantuan makanan	Bantuan disalurkan melalui RKS (Rumah Kasih Sayang) pada anggota-anggotanya yang mengalami keterbelakangan mental	2	1	1	2	1	7	49,7	100	49,7
	Paket Sembako	Pemberian bantuan berupa 200 Paket sembako dan Pakaian layak pakai diberikan kepada KK yang memiliki anggota keluarga down syndrome ataupun ODK	2	1	1	2	1	7	49,7	100	49,7
	Bantuan Makanan	Bantuan diberikan pada masyarakat keterbelakangan mental di enam desa yakni Desa Krebet Kecamatan Jambon, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, Desa Dayakan Kecamatan Badegan, Desa Pandak Kecamatan Balong, Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Paringan Kecamatan Jenangan.	2	1	1	2	1	7	49,7	100	49,7

Klaster	Program Bantuan	Implementasi	Efektivitas	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	Skor	Nilai total rating x nilai konstanta	Bobot Kegiatan (%)	Nilai akhir pencapaian program
	Bantuan Makanan Siap Saji	Bantuan diserahkan pada RKS yang bertugas untuk menyalurkan makanan ke masyarakat ODK maupun down syndrome tiap harinya di Desa Kreet dan Desa Sidoharjo.	2	1	1	2	1	7	49,7	100	49,7
	Bantuan makanan berupa beras dan susu	Pemberian bantuan diberikan kepada pemerintah Desa dan RKS untuk disalurkan pada masyarakat ODK di Desa Sidoharjo	2	1	1	2	1	7	49,7	100	49,7
	Pembangunan talud jalan	Jalan yang ditalud sepanjang 195 m di dukuh Klitik dengan pengerjaan selama 45 hari. Jalan difungsikan sebagai akses masyarakat untuk beraktivitas	3	1	1	2	2	9	63,9	100	63,9
	Pengerasan Jalan/Pavingisasi jalan di Dukuh Sidowayah		3	1	1	2	2	9	63,9	100	63,9
Klaster II Penanggung	Pembangunan Gedung TK	Sekolah telah difungsikan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat desa Sidoharjo	3	3	1	3	2	12	85,2	100	85,2
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan Kegiatan Pengolahan Limbah Ternak	Penyuluhan dilakukan berdasarkan Perhptani dengan pemerintah desa serta kelompok Tani dan KUBE yang ada di Desa Sidoharjo. Pelatihan diikuti oleh anggota KUBE	3	1	2	2	2	10	71	100	71
	Penyuluhan Bertanam secara vertikultur	Penyuluhan dilakukan berdasarkan Perhptani dengan pemerintah desa serta kelompok Tani dan KUBE yang ada di Desa Sidoharjo. Pelatihan diikuti oleh kelompok tani	3	1	2	2	2	10	71	100	71
	Bantuan Bibit	Bantuan diberikan pada kelompok	3	1	1	3	2	10	71	100	71

Klaster	Program Bantuan	Implementasi	Efektivitas	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	Skor	Nilai total rating x nilai konstanta	Bobot Kegiatan (%)	Nilai akhir pencapaian program
Klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	mangga Blimbing dan	tani yang ada di Desa Sidoharjo untuk diberikan pada anggota kelompok									
	Bantuan modal pertanian, pupuk dan benih padi	Penyuluhan dilakukan berdasarkan Perhiptani dengan pemerintah desa serta kelompok Tani dan KUBE yang ada di Desa Sidoharjo. Pelatihan diikuti oleh anggota KUBE dan kelompok tani	3	1	1	3	2	10	71	100	71
	bantuan pemberdayaan bibit ternak kambing	Pemberian bantuan diserahkan pada anggota KUBE khususnya yang memiliki anggota keluarga down syndrome dan ODK (orang dengan kebutuhan khusus)	3	1	1	3	2	10	71	100	71
	Bantuan Usaha Produktif ke 100 orang di Desa Krebet dan Sidoharjo, hewan ternak kambing, peralatan ternak, paket sembako	Bantuan diberikan pada 100 KK yang memiliki anggota keluarga down syndrome dan masyarakat ODK	2	1	1	3	2	9	63,9	100	63,9

Sumber: Hasil Analisis 2013

Berdasarkan tabel 4.19 terlihat bahwa bantuan yang diberikan cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang rendah terutama pada bantuan klaster ke-I. Pada bantuan klaster ke-II dan ke-III cenderung memiliki tingkat keberhasilan sedang.

Pada bantuan klaster ke-I yang bersifat konsumtif, nilai pencapaian akhir program rendah. Pada nilai akhir pencapaian program, bantuan klaster I memiliki rata-rata nilai di bawah 50. Hal ini karena bantuan yang bersifat konsumtif tidak dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di desa Sidoharjo. Pemberian bantuan yang bersifat konsumtif membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan. Hal ini tidak dapat dihindari karena banyaknya bantuan yang diberikan pada Desa Sidoharjo bersifat konsumtif dan tidak dapat ditindak lanjuti.

Pada klaster ke-I, aspek kecukupan dan pemerataan pada bantuan memiliki nilai yang rendah yakni 1 yang artinya bantuan tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Desa Sidoharjo serta pemerataan bantuan yang diberikan tidak mampu menjangkau seluruh kalangan. Bantuan klaster I yang bersifat konsumtif lebih diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat down syndrome dimana masyarakat down syndrome tidak mampu menindak lanjuti bantuan yang diberikan.

Pada bantuan klaster ke-II dan Ke-III masyarakat memiliki kesempatan untuk memajukan kesejahteraan hidup, namun pola pikir masyarakat yang belum berkembang membuat masyarakat belum dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan. Contohnya pada bantuan pemberian modal hewan ternak yang diberikan oleh kementerian sosial, masyarakat cenderung memilih menjual kembali hewan ternak tersebut. Masyarakat beranggapan akan lebih mudah mendapatkan uang dengan menjual hewan ternak tersebut. Masyarakat juga merasa kesulitan untuk berternak. Pemerintah Desa secara aktif terus melakukan pemantauan terhadap bantuan yang diberikan pada masyarakat. Seperti memberikan pengertian tentang manfaat yang diberikan termasuk pemberian modal untuk bertani maupun bantuan hewan ternak. Hal ini dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat desa agar lebih berpikiran terbuka.

4.5 Kelembagaan

4.5.1 Struktur Kelembagaan

Berdasarkan RPJM Desa tahun 2011-2015, terdapat tujuh kelembagaan yang ada di Desa Sidoharjo, kelembagaan tersebut antara lain:

1. Lembaga Pemerintahan Desa

Satuan terkecil di Desa Sidoharjo yakni Rukun Tetangga (RT) yang mempunyai fungsi pelayanan kepentingan masyarakat. Struktur Kepemimpinan Desa Sidoharjo tidak lepas dari struktur administratif pemerintahan desa. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas di Desa Sidoharjo termasuk melakukan pengawasan terhadap bantuan yang masuk ke Desa Sidoharjo.

Bagian yang menangani terkait penyaluran bantuan yakni KAUR KESRA yang menangani kesejahteraan masyarakat untuk memantau pelaksanaan penyaluran bantuan di Desa Sidoharjo.

2. LPMD

Kegiatan yang diadakan LPMD antara lain:

- 1) Musyawarah Penggalian Gagasan Rencana Pembangunan
- 2) Kunjungan Kerja ke Duku-dukuh
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lingkungan Program Alokasi Dana Desa;

3. Kelompok Tani

Kelompok tani di Desa Sidoharjo berjumlah 9 kelompok dan melayani kegiatan pertanian desa.

Program Kerja yang dilaksanakan kelompok tani antara lain:

- 1) Penyusunan Pola Tanam
- 2) Pengadaan Semprotan Bebas hama
- 3) Pengaturan air irigasi
- 4) Simpan pinjam
- 5) Arisan

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan organisasi perempuan yang membantu pemerintah desa dalam memberikan pembinaan ibu-ibu di berbagai bidang. Desa Sidoharjo memiliki satu organisasi PKK. PKK merupakan salah satu kelompok yang menjadi sasaran pengembangan masyarakat di Desa Sidoharjo karena secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat desa. Program Kerja yang dilakukan oleh PKK antara lain:

- 1) Arisan
- 2) Simpan Pinjam

- 3) Pertemuan Rutin
 - 4) Kursus Memasak
 - 5) Kursus Menjahit
 - 6) Simulasi
 - 7) Penyuluhan
 - 8) Apotik Hidup
 - 9) Kunjungan Desa Wisma
5. Kelembagaan Pemuda Desa

Organisasi Karang Taruna Desa membutuhkan pembinaan dan pengembangan dari instansi/lembaga terkait. Mengingat begitu pentingnya peran Organisasi Karang Taruna Desa ini bagi pembinaan generasi penerus perjuangan pembangunan. Peran kelembagaan pemuda desa masih terbatas pada pelaksana bantuan. Perlu adanya keterlibatan lebih dari lembaga pemuda dalam tahap perencanaan maupun pengawasan program

6. Kelembagaan Keagamaan

Penduduk Desa Sidoharjo mayoritas beragama islam. Kegiatan sosial keagamaan yang ada di desa ini didominasi dengan kegiatan pengajian antara lain bisa dilihat dari banyaknya kelompok jama'ah yasin-tahlil, manakib dan jama'ah takziah.

7. Kelembagaan Kesenian

Terdapat satu kelompok kesenian tari Reyog di Desa Sidoharjo. Kelompok/paguyuban kesenian Reyog ini cukup mewadahi bakat seni generasi muda desa. Namun mengingat minimnya dana pengembangan maka perlengkapan kesenian Reyog ini masih seadanya dan belum lengkap.

4.5.2 Diagram Venn

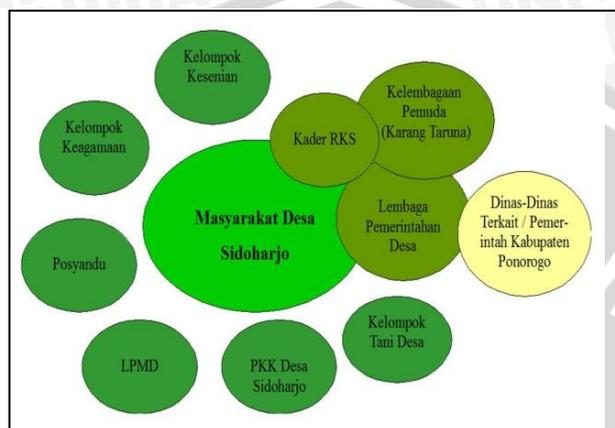
Peran lembaga menjadi salah satu penompang berjalannya bantuan yang masuk ke Desa Sidoharjo. Terdapat banyak lembaga yang ada dalam masyarakat Desa Sidoharjo, namun tidak semua lembaga aktif membantu dalam proses berjalannya bantuan di Desa Sidoharjo.

Diagram Venn berfungsi untuk menggambarkan pengaruh lembaga di Desa Sidoharjo dalam hal pendampingan pemberian bantuan untuk masyarakat desa. Penentuan peran kelembagaan terhadap bantuan yang masuk ke Desa Sidoharjo dilakukan dengan cara wawancara dengan Lembaga Pemerintahan Desa yang secara

aktif mengawasi keberlangsungan bantuan maupun program yang diberikan pemerintah baik daerah maupun provinsi.

Pada setiap bantuan di tiap klasternya tidak semua lembaga dilibatkan. Setiap lembaga memiliki fungsi masing-masing di tiap klater bantuan. Berikut diagram venn penggambaran peran lembaga dalam pelaksanaan bantuan di Desa Sidoharjo

1. Peran lembaga pada bantuan klaster I



Gambar 4.11 Diagram venn kelembagaan bantuan klaster-I Desa Sidoharjo

Berdasarkan gambar 4.20 terlihat bahwa terdapat dua lembaga yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat terkait bantuan yang diterima masyarakat. Lembaga yang secara aktif berperan maupun sebagai salah satu kelompok sasaran yakni:

1) Lembaga Pemerintah Desa Sidoharjo

Pemerintah desa berperan sebagai penghubung dinas kabupaten/pemerintah provinsi serta pusat dalam pemberian bantuan. Pemerintah desa akan menghubungi lembaga terkait yakni Karangtaruna desa dalam pembagian bantuan. Pemberian bantuan untuk masyarakat keterbelakangan mental pemerintah menghubungi kader RKS yang masih berasal karangtaruna maupun anggota lembaga pemerintah desa yakni bidang KAUR KESRA.

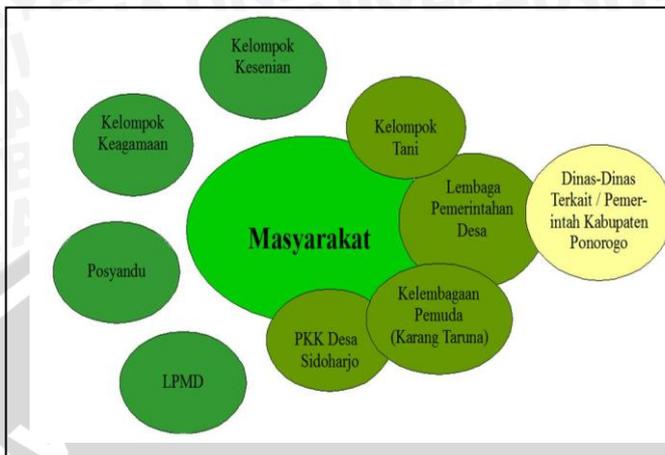
2) Karan Taruna

Lembaga karan taruna sebagai lembaga pemuda yang turut dalam pelaksanaan bantuan desa. Beberapa anggota karan taruna merupakan kader dari program RKS (Rumah Kasih Sayang) yang salah satu tugasnya yakni menyalurkan bantuan makanan siap saji tiap harinya.

Kelembagaan pada klaster I lebih bersifat sebagai pihak penyalur. Belum adanya sistem administrasi yang baik membuat program bantuan tidak terdata

secara baik. Lembaga pemerintah desa juga tidak memiliki data secara pasti bantuan yang masuk ke Desa Sidoharjo. Hal ini membuat program bantuan yang masuk sulit untuk dievaluasi.

2 Peran lembaga pada bantuan klaster II



Gambar 4.12 Diagram venn kelembagaan bantuan klaster-II Desa Sidoharjo

Berdasarkan gambar 4.21 terlihat bahwa terdapat tiga lembaga yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat terkait bantuan yang diterima masyarakat. Lembaga yang secara aktif berperan maupun sebagai salah satu kelompok sasaran yakni:

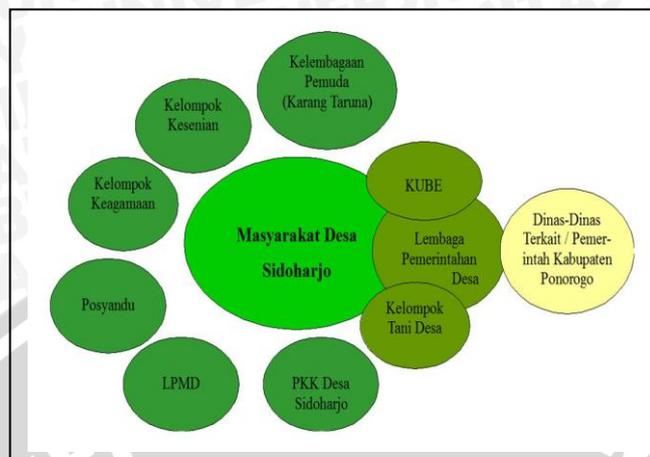
- a. Lembaga Pemerintahan Desa
- b. Kelompok Tani
- c. PKK Desa Sidoharjo
- d. Kelembagaan Pemuda Desa

Lembaga pemerintahan desa serta kelompok tani dan PKK berkaitan erat dalam pelaksanaan program karena PKK dan Kelompok tani merupakan lembaga/kelompok sasaran penerima bantuan di Desa. Program/bantuan yang masuk ke Desa Sidoharjo melalui lembaga pemerintahan desa terlebih dahulu. Bantuan tersebut kemudian disalurkan ke masyarakat melalui lembaga tertentu seperti PKK dan kelompok tani yang merupakan kelompok sasaran program seperti program penyuluhan maupun program pemberdayaan masyarakat.

Pada bantuan klaster ke II kelembagaan lebih cenderung sebagai pihak penerima bantuan atau sasaran program. Pihak lembaga pemerintah desa bertugas sebagai pelaksana program yang bertugas sebagai penyalur bantuan pada lembaga-lembaga yang berkaitan, namun pemerintah desa tidak memiliki

sistem administrasi yang baik sehingga program yang masuk ke Desa Sidoharjo tidak dikelola secara optimal.

3 Peran lembaga dalam bantuan klaster III



Gambar 4. 13 Diagram venn kelembagaan bantuan klaster-III Desa Sidoharjo

Berdasarkan gambar 4.22, terlihat bahwa terdapat dua lembaga yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat terkait bantuan yang diterima masyarakat. Lembaga yang secara aktif berperan maupun sebagai salah satu kelompok sasaran yakni:

- a. Lembaga pemerintahn desa
- b. Kelompok tani desa
- c. Pengurus KUBE

Berdasarkan program bantuan yang berupa bantuan modal, pemerintah desa serta kelompok tani bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan yang diberikan kepada para petani. Selain itu terdapat pengurus KUBE yang bertugas dalam pengawasan pemberian bantuan bibit ternak kambing pada masyarakat. Kepengurusan KUBE masih dalam lingkup pengurus pemerintahan Desa yakni Kaur Kesra yang turut dalam pengawasan bantuan.

Permasalahan kelembagaan:

1. Peran kelembagaan di Desa Sidoharjo cenderung sebagai penyalur/kordinator bantuan sehingga tidak ada tindak lanjut setelah program berjalan;
2. Pemerintah desa kurang memiliki sistem administrasi yang baik sehingga bantuan yang masuk tidak terorganisir/terdata. Tidak adanya data yang terorganisir membuat program bantuan yang masuk tidak dapat dievaluasi oleh pemerintah desa;
3. Program bantuan RKS yang masuk dikontrol secara langsung oleh pihak

kementrian sosial, sedangkan pemerintah desa dari Desa Krebet dan Desa Sidoharjo tidak melakukan control apabila tidak ada control dari pihak Kementrian Sosial;

4. Kurang adanya kordinasi yang baik dari pihak pemerintah desa dengan kelembagaan yang ada di Desa Sidoharjo. Kelembagaan yang ada cenderung sebagai pelaksana maupun penerima sehingga tidak dilibatkan secara penuh dalam rencana pelaksanaan program

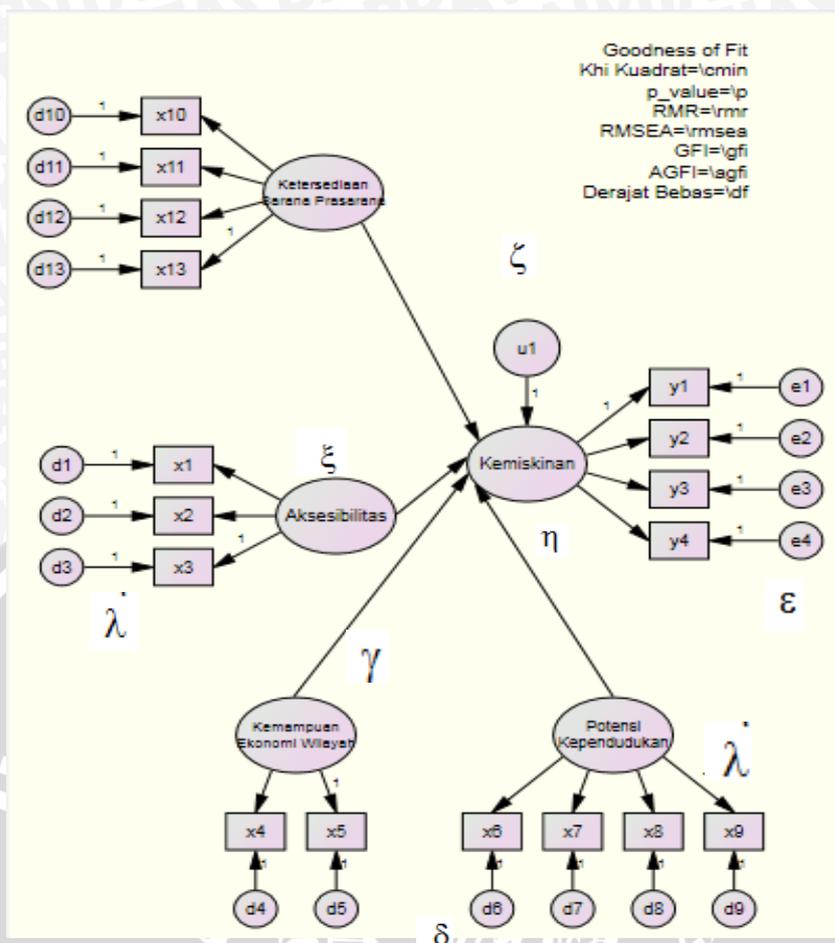
4.6 Analisis SEM

Analisis SEM pada studi penelitian ini menggunakan inputan data kuisisioner terkait presepsi masyarakat terhadap penyebab kemiskinan di Desa Sidoharjo.

A. Pengembangan diagram alur

Pada model struktural pada analisis SEM studi ini, variabel serta indikaor yang digunakan diambil berdasarkan penelitian Dinas PU Provinsi Jawa Timur terkait Penyusunan Program Pembangunan Bidang Permukiman Pada Desa Miskin Tertinggal di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2011. Berdasarkan penelitian sebelumnya , diketahui keterkaitan hubungan anatar variabel. Hubungan tersebut selanjutnya akan dibuat diagram alur hubungan kausalitas antar faktor. Input grafik yang dibuat dengan program AMOS adalah sebagai berikut:





Gambar 4.14 Grafik Input faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan

B. Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran

1. Model Pengukuran SEM

$$\eta = \gamma_1 \xi_1 + \gamma_2 \xi_2 + \gamma_3 \xi_3 + \gamma_4 \xi_4 + \zeta$$

Dimana:

η = konstruk kemiskinan

ξ_1 = konstruk aksesibilitas

ξ_2 = konstruk kemampuan ekonomi wilayah

ξ_3 = konstruk potensi penduduk

ξ_4 = konstruk ketersediaan sarana prasarana

ζ = galat model

2. Model pengukuran peubah tak bebas

$$y_1 = \lambda_1 \eta + \varepsilon_1$$

$$y_2 = \lambda_2 \eta + \varepsilon_2$$

$$y_3 = \lambda_3 \eta + \varepsilon_3$$

$$y_4 = \lambda_4 \eta + \varepsilon_4$$

3. Model pengukuran peubah bebas

$$x_1 = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$x_2 = \lambda_2 \xi_1 + \delta_2$$

$$x_3 = \lambda_3 \xi_1 + \delta_3$$

$$x_4 = \lambda_4 \xi_2 + \delta_4$$

$$x_5 = \lambda_5 \xi_2 + \delta_5$$

$$x_6 = \lambda_6 \xi_3 + \delta_6$$

$$x_7 = \lambda_7 \xi_3 + \delta_7$$

$$x_8 = \lambda_8 \xi_3 + \delta_8$$

$$x_9 = \lambda_9 \xi_3 + \delta_9$$

$$x_{10} = \lambda_{10} \xi_4 + \delta_{10}$$

$$x_{11} = \lambda_{11} \xi_4 + \delta_{11}$$

$$x_{12} = \lambda_{12} \xi_4 + \delta_{12}$$

$$x_{13} = \lambda_{13} \xi_4 + \delta_{13}$$

Keterangan:

y_1 = kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar

y_2 = kemampuan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan

y_3 = bantuan yang diterima

y_4 = pendapatan rumah tangga yang tidak mencukupi

λ = loading faktor

ε = galat pengukuran pada variabel laten y

x_1 = keberadaan Alat transportasi umum

x_2 = jarak desa ke pusat kegiatan

x_3 = kondisi jalan

x_4 = ekonomi Wilayah

x_5 = ketersediaan fasilitas umum

x_6 = tingkat pendidikan

x_7 = mata pencaharian

x_8 = tingkat harapan hidup

x_9 = laju pertumbuhan

x_{10} = ketersediaan air bersih

x_{11} = ketersediaan telekomunikasi

x_{12} = kondisi rumah

x_{13} = ketersediaan aliran listrik

δ = galat pengukuran pada variabel laten x

C. Memilih matriks input dan estimasi yang diusulkan

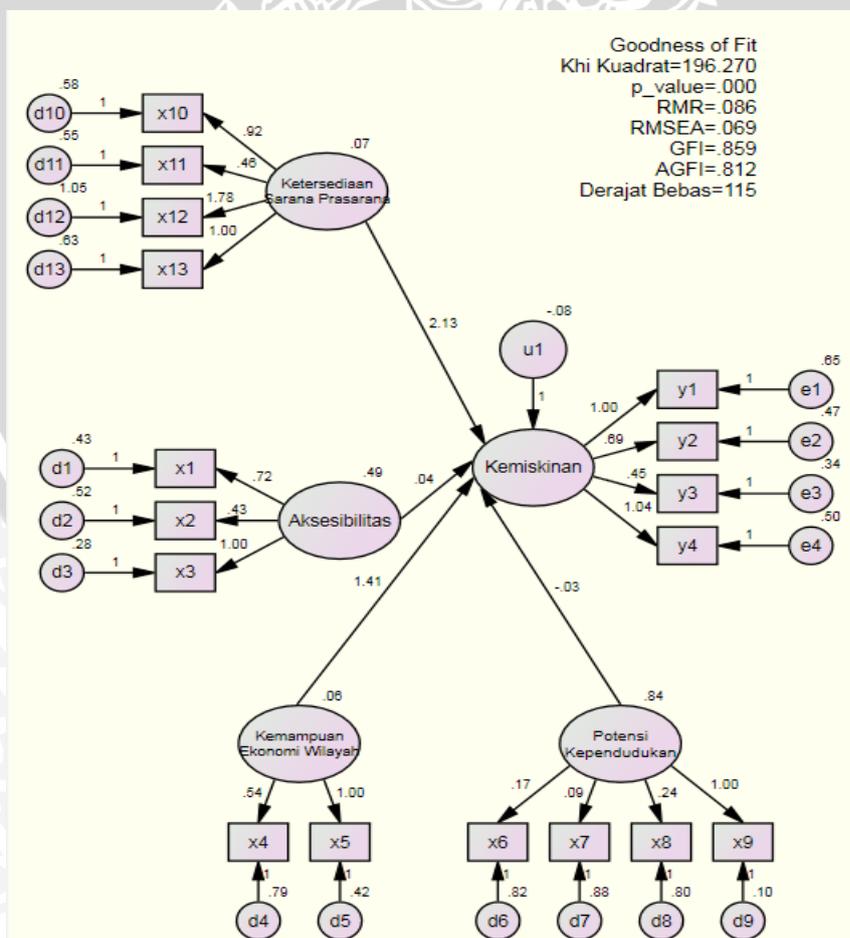
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola saling hubungan, sehingga matriks yang digunakan adalah matriks dalam bentuk korelasi. Program AMOS akan mengkonversikan dari data mentah ke bentuk kovarian atau korelasi lebih dahulu sebagai input analisis. Model estimasi standard AMOS adalah menggunakan estimasi maksimum likelihood (ML). Estimasi ML menghendaki terpenuhinya asumsi:

1. Jumlah sampel besar

Pada metode ML akan efektif pada jumlah sampel antara 150-400 data. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 sampel, jumlah tersebut dapat dikategorikan ke dalam sampel besar atau memenuhi minimum persyaratan jumlah sampel.

2. Model yang dihipotesiskan valid

Setelah model hipotesis dan matriks data diinput, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:



Gambar 4.15 Grafik output faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan

D. Menilai identifikasi Model Struktural

Berdasarkan grafik output dapat diketahui bahwa, nilai *degree of freedom* yang dihasilkan yakni 115, dimana $115 > 0$ sehingga model tersebut *overidentified*; karena df positif dan kalimat “*minimum was achieved*” sehingga model tersebut dapat diidentifikasi estimasinya.

E. Menilai Kriteria *Goodness of Fit*

Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pemenuhan asumsi yang disyaratkan SEM, dan kesesuaian model berdasarkan kriteria *goodness-of-fit tertentu*. Beberapa indeks kesesuaian dan *cut-off value*-nya yang digunakan untuk menguji apakah sebuah model diterima atau ditolak adalah:

Tabel 4.20 Hasil Analisis *Goodness of Fit*

Ukuran GOF	Tingkat kecocokan yang bisa diterima	Hasil	Keterangan
<i>ABSOLUTE –FIT MEASURES</i>			
Statistic Chi-square	Semakin kecil semakin baik.	196,27	Kurang baik
Non-centrality parameter (NCP)	Semakin kecil semakin baik.	81,27	Cukup baik
Goodness-of-fit index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0,859	Cukup baik
Root mean Square residuan (RMR)	≤ 0.05	0,086	Cukup baik
Root mean Square error of approximation (RMSEA)	≤ 0.08	0,069	baik
Expected Cross-validation-index (ECVI)	Semakin kecil semakin baik	2,170	Baik
<i>INCREMENTAL FIT MEASURES</i>			
Tucker-Lewis index atau non-Normed Fit Index (TLI atau NNFI)	≥ 0.90	0,606	Kurang baik
Normed fix index	≥ 0.90	0,484	Kurang baik
Adjusted goodness of fit index (AGFI)	≥ 0.90	0,812	Cukup baik
Relative fit index (RFI)	≥ 0.90	0,389	Kurang baik
Incremental fit index (IFI)	≥ 0.90	0,693	Kurang baik
Comparative fit index	≥ 0.90	0,667	Kurang baik
<i>PARSIMONIUS FIT MEASURES</i>			
Parsimonious Goodness Of Fit (PGFI)	Semakin besar semakin baik	0,646	Kurang baik
Normed Chi-Square	$1.0 < \text{normed chi square} < 2$ atau 3	1,707	Baik
Parsimonious normed fit index (PNFI)	Semakin tinggi semakin baik	0,409	Kurang baik
Akaike information criterion (AIC)	nilai default AIC dari model lebih kecil dari nilai satured model dan independent model AIC.	272,27 306,00 414,11	baik
Consistent akaikie information criterion (CAIC)	nilai default CAIC dari model lebih kecil dari nilai satured model atau independent model CAIC	424,674 919,627	baik
<i>OTHERS GOFI</i>			
Critical “N” (CN)	$CN \geq 200$ / melebihi nilai sampel yang digunakan	108/117	Kurang baik

Sumber: Hasil output analisis SEM 2013

F. Interpretasi model

Sebelum melakukan interpretasi model dilakukan terlebih dahulu analisis reabilitas model pengukuran ini:

1. Uji Reabilitas

Sebelum masuk dalam interpretasi model, terlebih dahulu dilakukan uji reabilitas dari masing-masing konstruk bentukan. Reabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator sejauh variabel bentukan yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah variabel bentukan yang umum. Nilai construct reability adalah minimal 0,70 (Santoso, 2011). Apabila terdapat nilai konstruk dibawah 0,7 sebaiknya dilakukan modifikasi model.

$$\text{Construct reability} = \frac{(\sum \lambda_{ij})^2}{(\sum \lambda_{ij})^2 + \sum \varepsilon_j}$$

Sum standardized loading untuk:

$$\text{Aksesibilitas} = 0,72 + 0,43 + 1 = 2,15$$

$$\text{Ketersediaan sarana prasarana} = 0,91 + 0,41 + 1,79 + 1 = 4,16$$

$$\text{Kemampuan ekonomi wilayah} = 0,54 + 1 = 1,54$$

$$\text{Potensi kependudukan} = 0,17 + 0,09 + 0,24 + 1 = 1,5$$

$$\text{Kemiskinan} = 1 + 0,69 + 0,45 + 1,04 = 3,18$$

Sum measurement error untuk:

$$\text{Aksesibilitas} = 0,43 + 0,52 + 0,28 = 1,23$$

$$\text{Kemampuan ekonomi wilayah} = 0,79 + 0,42 = 1,21$$

$$\text{Potensi kependudukan} = 0,82 + 0,88 + 0,80 + 0,10 = 2,6$$

$$\text{Ketersediaan sarana prasarana} = 0,58 + 0,56 + 1,05 + 0,63 = 2,83$$

$$\text{Kemiskinan} = 0,65 + 0,47 + 0,34 + 0,50 = 1,96$$

Nilai reabilitas konstruk untuk masing-masing konstruk yakni:

$$\text{Aksesibilitas} = \frac{2,15^2}{2,15^2 + 1,23^2} = 0,75$$

$$\text{Kemampuan ekonomi wilayah} = \frac{1,54^2}{1,54^2 + 1,21^2} = 0,62$$

$$\text{Potensi kependudukan} = \frac{1,5^2}{1,5^2 + 2,6^2} = 0,25$$

$$\text{Ketersediaan sarana prasarana} = \frac{4,16^2}{4,16^2 + 2,83^2} = 0,70$$

$$\text{Kemiskinan} = \frac{3,17^2}{3,17^2 + 1,97^2} = 0,72$$

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat konstruk potensi kependudukan yang memiliki nilai reabilitas jauh dibawah 0,7 yakni 0,25; sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk potensi kependudukan tidak memenuhi nilai standar reabilitas, sedangkan konstruk kemampuan ekonomi wilayah memiliki nilai diantara 0,60 – 0,70 sehingga konstruk masih dapat diterima.

2. Variance Extracted

Dalam analisis faktor konfirmatori, prosentase rata-rata nilai Variance Extracted (AVE) antar item atau indikator suatu set konstruk laten merupakan ringkasan konvergen indikator (Ghozali, 2011). AVE dapat dihitung dengan menggunakan nilai standardized loading dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Variance extracted} = \frac{\sum \lambda_{ij}^2}{\sum \lambda_{ij}^2 + \sum \epsilon_j}$$

Simbol λ menunjukkan standardized faktor loading dan i adalah jumlah item atau indicator. Jadi untuk n item, AVE dihitung sebagai total kuadrat *standardized factor loading (squared multiple correlation)* dibagi dengan total kuadrat standardized loading ditambah total varians dari error. Nilai $AVE \geq 0,50$ menunjukkan adanya *convergent* yang baik. Nilai AVE harus dihitung untuk setiap konstruk laten. Jadi dalam hal model, maka AVE harus dihitung untuk empat konstruk laten aksesibilitas, kemampuan ekonomi wilayah, potensi kependudukan, ketersediaan sarana prasarana. Berikut ini perhitungan masing-masing AVE

Jumlah kuadrat standar loading:

Aksesibilitas	$= 0,72^2 + 0,43^2 + 1^2$	$= 1,70$
kemampuan ekonomi wilayah	$= 0,54^2 + 1^2$	$= 1,29$
Potensi kependudukan	$= 0,17^2 + 0,09^2 + 0,24^2 + 1^2$	$= 1,10$
ketersediaan sarana prasarana	$= 0,92^2 + 0,46^2 + 1,78^2 + 1^2$	$= 5,23$
Kemiskinan	$= 1^2 + 0,69^2 + 0,45^2 + 1,04^2$	$= 2,76$

Sum measurement error untuk:

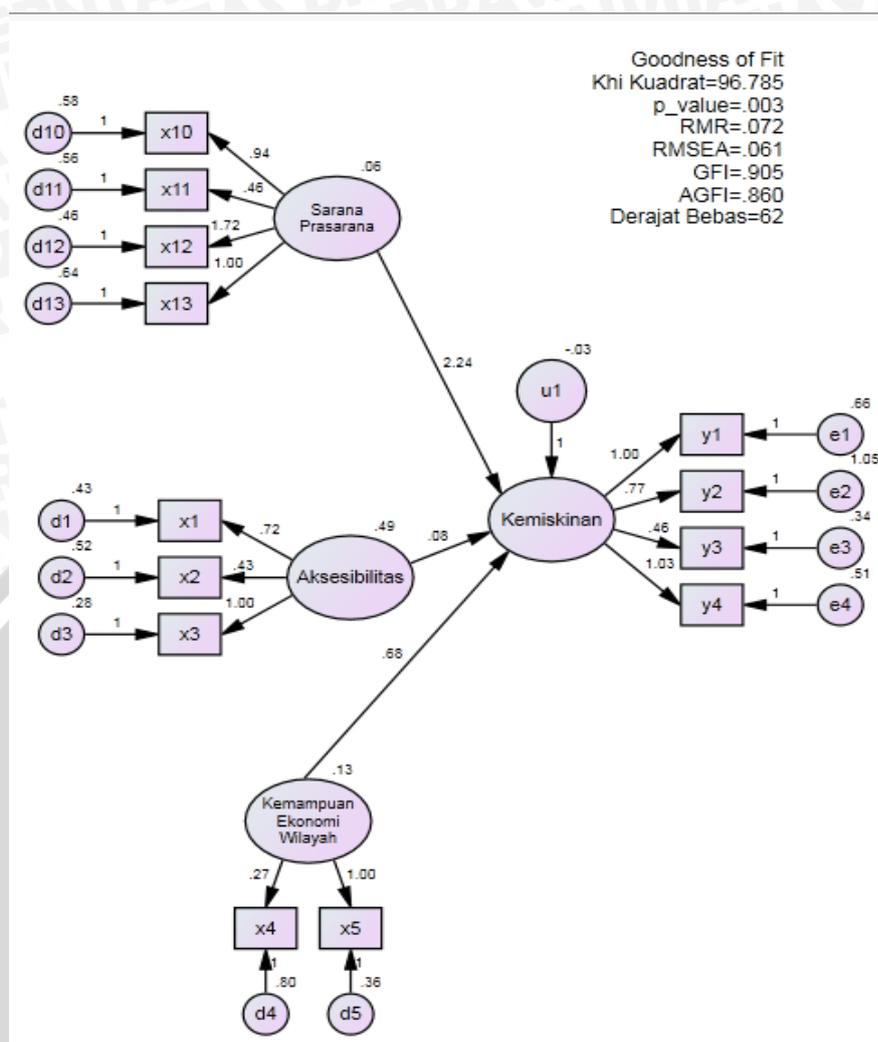
Aksesibilitas	$= 0,43 + 0,52 + 0,28$	$= 1,23$
Kemampuan ekonomi wilayah	$= 0,79 + 0,42$	$= 1,21$
Potensi kependudukan	$= 0,82 + 0,88 + 0,80 + 0,10$	$= 2,60$
Ketersediaan sarana prasarana	$= 0,58 + 0,56 + 1,05 + 0,63$	$= 2,82$
Kemiskinan	$= 0,65 + 0,47 + 0,34 + 0,50$	$= 1,96$

Jadi nilai AVE untuk konstruk laten

aksesibilitas	$= \frac{1,70}{1,70+1,23}$	$= 0,58$
kemampuan ekonomi wilayah	$= \frac{1,29}{1,29+1,121}$	$= 0,52$
Potensi Kependudukan	$= \frac{1,10}{1,10+2,60}$	$= 0,29$
ketersediaan sarana prasarana	$= \frac{5,22}{5,22+2,28}$	$= 0,70$
Kemiskinan	$= \frac{2,76}{2,76+1,96}$	$= 0,59$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat variabel laten di atas memenuhi kriteria $AVE \geq 0,50$ yakni aksesibilitas, kemampuan ekonomi wilayah, ketersediaan sarana prasarana dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan *convergent* yang baik pada indikator dalam tiap konstruk aksesibilitas, kemampuan ekonomi wilayah, ketersediaan sarana prasarana dan kemiskinan. Pada variabel potensi kependudukan memiliki nilai AVE yang tidak memenuhi asumsi kriteria $AVE > 0,50$ yakni 0,29; hal ini menunjukkan adanya hubungan *convergent* yang tidak baik pada indikator dalam konstruk potensi kependudukan.

Berdasarkan uji reabilitas dan AVE, variabel potensi kependudukan tidak memenuhi nilai standar asumsi ke dua nya. Oleh karena itu konstruk potensi kependudukan harus dihilangkan dalam penyusunan model karena tidak memenuhi persyaratan uji reabilitas model.



Gambar 4.16 Grafik output model faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan

Tabel 4.21 Hasil Analisis *Goodness of Fit* model

Ukuran GOF	Tingkat kecocokan yang bisa diterima	Hasil	Keterangan
ABSOLUTE –FIT MEASURES			
Statistic Chi-square	Semakin kecil semakin baik.	97,291	Kurang baik
Non-centrality parameter (NCP)	Semakin kecil semakin baik.	35,291	Cukup baik
Goodness-of-fit index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0.903	Baik
Root mean Square residuan (RMR)	≤ 0.05	0.073	Cukup baik
Root mean Square error of approximation (RMSEA)	≤ 0.08	0.062	Baik
Expected Cross-validation-index (ECVI)	Semakin kecil semakin baik	1.042	Baik
INCREMENTAL FIT MEASURES			
Tucker-Lewis index atau non-Normed Fit Index (TLI atau NNFI)	≥ 0.90	0.767	Cukup baik
Normed fix index	≥ 0.90	0.638	Kurang baik
Adjusted goodness of fit index (AGFI)	≥ 0.90	0.858	Cukup baik
Relative fit index (RFI)	≥ 0.90	0.544	kurang baik
Incremental fit index (IFI)	≥ 0.90	0.829	Cukup Baik
Comparative fit index	≥ 0.90	0.815	Cukup Baik

Ukuran GOF	Tingkat kecocokan yang bisa diterima	Hasil	Keterangan
PARSIMONIUS FIT MEASURES			
Parsimonious Goodness Of Fit (PGFI)	Semakin besar semakin baik	0.616	Kurang baik
Normed Chi-Square	1.0 <normed chi square < 2 atau 3	1,569	Baik
Parsimonious normed fit index (PNFI)	Semakin tinggi semakin baik	0.507	Kurang baik
Akaike information criterion (AIC)	nilai AIC dari model yang lebih kecil dari nilai saturated AIC.	155,291 182,000 294,492	baik
Consistent akaike information criterion (CAIC)	nilai CAIC dari model yang lebih kecil dari nilai saturated CAIC.	271,599 546,968	baik
OTHERS GOFI			
Critical "N" (CN)	CN \geq 200 / melebihi nilai sampel yang digunakan	125/140	Kurang baik

Sumber: Hasil Output analisis modifikasi SEM

3. Analisis hubungan antar kosntruk

Diagram Jalur

Tabel 4.22 Koefisien jalur

Variabel	Koef Jalur
Aksesibilitas → kemiskinan	0,04
Kemampuan ekonomi wilayah → kemiskinan	1,41
Ketersediaan sarana prasarana → kemiskinan	2,13

Sumber: Hasil analisis 2013

Berdasarkan koefisien jalur, dapat disimpulkan pula dari ketiga konstruk/variabel x yang memiliki nilai covergent atau yang memiliki hubungan yang positif dengan variabel y atau kemampuan ekonomi wilayah, aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana berbanding searah dengan penanggulangan kemiskinan di Desa Sidoharjo. proses selanjutnya adalah

1) Perumusan hipotesis

Hipotesisi hubungan kostruk aksesibilitas dengan kemiskinan

H_0 = Tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) antara kostruk aksesibilitas dengan kemiskinan

H_1 = Terdapat hubungan yang nyata (signifikan) antara kostruk aksesibilitas dengan kemiskinan

Hipotesisi hubungan kostruk ekonomi wilayah dengan kemiskinan

H_0 = Tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) antara kostruk ekonomi wilayah dengan kemiskinan

H_1 = Terdapat hubungan yang nyata (signifikan) antara kostruk ekonomi wilayah dengan kemiskinan

Hipotesisi hubungan kostruk ketersediaan sarana prasarana dengan kemiskinan
 H_0 = Tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) antara konstruk ketersediaan sarana prasarana dengan kemiskinan

H_1 = Ada hubungan yang nyata (signifikan) antara konstruk ketersediaan sarana prasarana dengan kemiskinan

2) Dasar Pengambilan Keputusan

Lihat angka pada kolom p (*probability*), dengan *cut of point* 0,05

3) Analisis

Output estimasi yakni pada bagian Regression Weights

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kemiskinan <---	Ketersediaan_Sarana Prasarana	2.129	1.024	2.079	.038	
Kemiskinan <---	Aksesibilitas	.039	.092	.426	.670	
Kemiskinan <---	Kemampuan_Ekonomi Wilayah	1.405	2.361	.595	.552	
x13 <---	Ketersediaan_Sarana Prasarana	1.000				
x12 <---	Ketersediaan_Sarana Prasarana	1.850	.750	2.467	.014	
x11 <---	Ketersediaan_Sarana Prasarana	.476	.341	1.399	.162	
x10 <---	Ketersediaan_Sarana Prasarana	.941	.442	2.129	.033	
x3 <---	Aksesibilitas	1.000				
x2 <---	Aksesibilitas	.433	.145	2.981	.003	
x1 <---	Aksesibilitas	.722	.229	3.147	.002	
y1 <---	Kemiskinan	1.000				
y2 <---	Kemiskinan	.689	.160	4.308	***	
y3 <---	Kemiskinan	.449	.121	3.716	***	
y4 <---	Kemiskinan	1.029	.213	4.825	***	
x5 <---	Kemampuan_Ekonomi Wilayah	1.000				
x4 <---	Kemampuan_Ekonomi Wilayah	.558	.622	.898	.369	

Gambar 4.17 Output nilai *Regression Weights*

Berdasarkan output *Regression Weights* Hubungan variabel eksogen ketersediaan sarana prasarana dengan variabel endogen kemiskinan H_0 ditolak atau dianggap memiliki hubungan yang nyata (signifikan) karena nilai p di bawah 0,05 yakni 0,021. Sedangkan hubungan endogen lainnya seperti aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah, H_0 diterima atau dianggap memiliki hubungan yang tidak nyata karena nilai p jauh di atas 0,05 (yakni 0,411 dan 0,671).

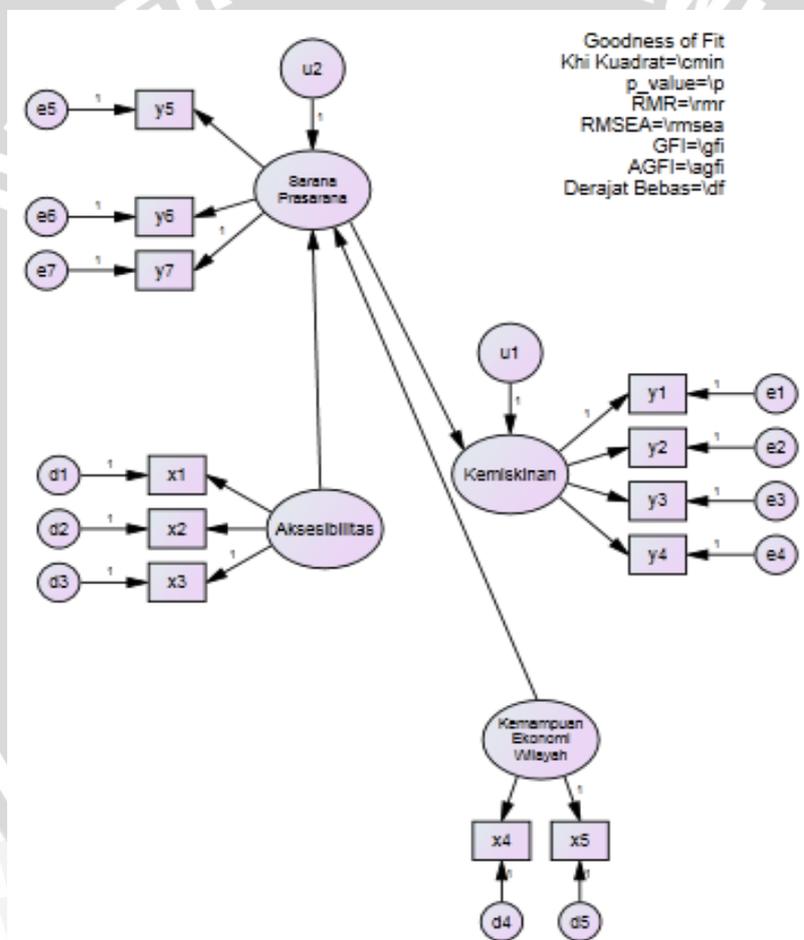
Berdasarkan interpretasi output analisis SEM dapat diketahui bahwa faktor sarana prasarana memiliki nilai signifikan terhadap kemiskinan sedangkan untuk variabel aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah memiliki hubungan tidak nyata terhadap kemiskinan di Desa Sidoharjo.

G. Modifikasi Model

1. Pengembangan Diagram Jalur Modifikasi

Sebuah model struktural yang secara statistik dapat dibuktikan fit dan nilai variabel yang signifikan tidaklah kemudian dikatakan sebagai satu-satunya model terbaik. Oleh karena itu berdasarkan interpretasi output analisis SEM, dilakukan modifikasi bentuk model lain yang dapat diterima secara statistik didukung oleh teori-teori pembentuk model.

Modifikasi dilakukan berdasarkan hasil output analisis SEM dengan menghilangkan indikator yang tidak memiliki hubungan signifikan terhadap konstruk. Modifikasi model bertujuan untuk mencari model terbaik berdasarkan output analisis sebelumnya

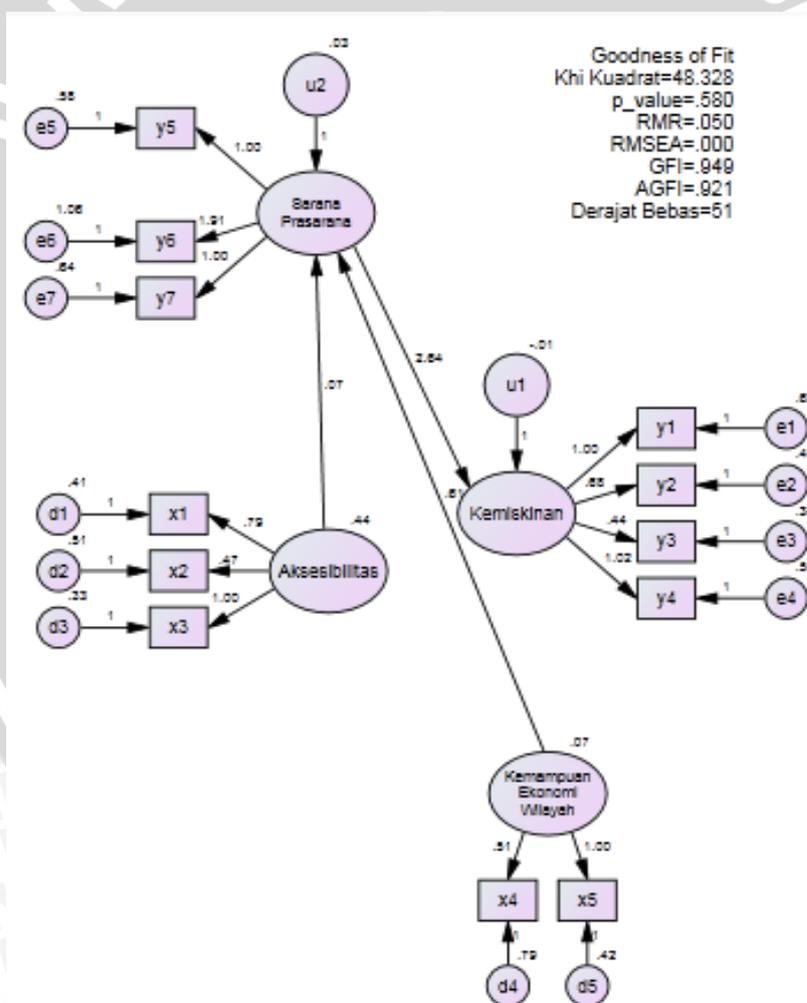


Gambar 4.18 Input modifikasi model faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan

Pada input modifikasi model SEM, indikator ketersediaan sarana telekomunikasi dihilangkan dari model karena memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap konstruk ketersediaan sarana-prasarana karena memiliki nilai probabilitas $\geq 0,05$ ($p_{x11} = 0,162$ dimana $\geq 0,05$). Selain itu variabel aksesibilitas dan kemampuan ekonomi

wilayah tidak dihubungkan ke variabel kemiskinan melainkan dihubungkan dengan variabel ketersediaan sarana prasarana. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil output analisis SEM sebelumnya, variabel aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah tidak memiliki hubungan yang nyata (signifikan) terhadap variabel kemiskinan dengan nilai $p \geq 0,05$ (0,670 dan 0,552). Output sebelumnya yang menyebutkan bahwa variabel aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah tidak memiliki hubungan yang nyata (signifikan) terhadap variabel kemiskinan tidak sepenuhnya dapat menyatakan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan terhadap variabel kemiskinan, pada modifikasi model bertujuan untuk mengetahui hubungan tidak langsung antara kedua variabel tersebut terhadap variabel kemiskinan melalui variabel ketersediaan sarana prasarana yang memiliki hubungan signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Output modifikasi model SEM:



Gambar 4.19 Grafik output model faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan

Keterangan:

- y_1 = kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar
 y_2 = kemampuan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan
 y_3 = bantuan yang diterima
 y_4 = pendapatan rumah tangga yang tidak mencukupi
 y_5 = ketersediaan air bersih
 y_6 = kondisi rumah
 y_7 = ketersediaan jaringan listrik
 x_1 = keberadaan Alat transportasi umum
 x_2 = jarak desa ke pusat kegiatan
 x_3 = kondisi jalan
 x_4 = ekonomi Wilayah
 x_5 = ketersediaan fasilitas umum

2. Menilai Kriteria *Goodness of Fit*

Tabel 4.23 Hasil Analisis *Goodness of Fit* modifikasi model

Ukuran GOF	Tingkat kecocokan yang bisa diterima	Hasil	Keterangan
ABSOLUTE –FIT MEASURES			
Statistic Chi-square	Semakin kecil semakin baik.	48,328	Cukup baik
Non-centrality parameter (NCP)	Semakin kecil semakin baik.	0,00	baik
Goodness-of-fit index (GFI)	$GFI \geq 0.90$	0.949	baik
Root mean Square residuan (RMR)	≤ 0.05	0.050	baik
Root mean Square error of approximation (RMSEA)	≤ 0.08	0.00	baik
Expected Cross-validation-index (ECVI)	Semakin kecil semakin baik	0,687	baik
INCREMENTAL FIT MEASURES			
Tucker-Lewis index atau non-Normed Fit Index (TLI atau NNFI)	≥ 0.90	1,000	baik
Normed fix index	≥ 0.90	0.783	baik
Adjusted goodness of fit index (AGFI)	≥ 0.90	0.921	baik
Relative fit index (RFI)	≥ 0.90	0.720	baik
Incremental fit index (IFI)	≥ 0.90	1,000	baik
Comparative fit index	≥ 0.90 .	1,000	baik
PARSIMONIUS FIT MEASURES			
Parsimonious Goodness Of Fit (PGFI)	Semakin besar semakin baik	0.620	Kurang baik
Normed Chi-Square	1.0 < normed chi square < 2 atau 3	0,948	baik
Parsimonious normed fit index (PNFI)	Semakin tinggi semakin baik	0.605	kurang baik
Akaike information criterion (AIC)	nilai AIC dari model yang lebih kecil dari nilai saturated AIC.	102,328 156,000 246,994	baik

Ukuran GOF	Tingkat kecocokan yang bisa diterima	Hasil	Keterangan
Consistent akaike information criterion (CAIC)	nilai CAIC dari model yang lebih kecil dari nilai saturated CAIC.	210,615 468,830	baik
<i>OTHERS GOFI</i>			
Critical "N" (CN)	CN \geq 200 / melebihi nilai sampel yang digunakan	212/239	baik

Sumber: Hasil output analisis SEM 2013

3. Interpretasi Model

Sebelum melakukan interpretasi model dilakukan terlebih dahulu analisis reabilitas model modifikasi seperti model yang belum dimodifikasi sebelumnya;

a. Uji reabilitas

Sum standardized loading untuk:

$$\text{Aksesibilitas} = 0,79 + 0,47 + 1 = 2,26$$

$$\text{Ketersediaan sarana prasarana} = 1 + 1,91 + 1 = 3,91$$

$$\text{Kemampuan ekonomi wilayah} = 0,51 + 1 = 1,51$$

$$\text{Kemiskinan} = 1 + 0,66 + 0,44 + 1 = 3,1$$

Sum measurement error untuk:

$$\text{Aksesibilitas} = 0,41 + 0,51 + 0,33 = 1,25$$

$$\text{Kemampuan ekonomi wilayah} = 0,79 + 0,42 = 1,21$$

$$\text{Ketersediaan sarana prasarana} = 0,58 + 1,06 + 0,64 = 2,28$$

$$\text{Kemiskinan} = 0,64 + 0,47 + 0,34 + 0,51 = 1,96$$

Nilai reabilitas konstruk untuk masing-masing konstruk yakni:

$$\text{Aksesibilitas} = \frac{2,3^2}{2,3^2 + 1,25^2} = 0,77$$

$$\text{Kemampuan ekonomi wilayah} = \frac{1,51^2}{1,51^2 + 1,21^2} = 0,61$$

$$\text{Ketersediaan sarana prasarana} = \frac{3,91^2}{3,91^2 + 2,28^2} = 0,75$$

$$\text{Kemiskinan} = \frac{3,1^2}{3,1^2 + 1,96^2} = 0,72$$

b. Uji *Variance Extracted*

Jumlah kuadrat standar loading:

$$\text{Aksesibilitas} = 0,79^2 + 0,47^2 + 1^2 = 1,85$$

$$\text{kemampuan ekonomi wilayah} = 0,51^2 + 1^2 = 1,26$$

$$\text{ketersediaan sarana prasarana} = 1^2 + 1,91^2 + 1^2 = 5,65$$

$$\text{Kemiskinan} = 1^2 + 0,66^2 + 0,44^2 + 1,02^2 = 2,63$$

Sum measurement error untuk:

$$\begin{aligned} \text{Aksesibilitas} &= 0,41 + 0,50 + 0,34 = 1,25 \\ \text{Kemampuan ekonomi wilayah} &= 0,79 + 0,42 = 1,21 \\ \text{Ketersediaan sarana prasarana} &= 0,58 + 1,06 + 0,64 = 2,28 \\ \text{Kemiskinan} &= 0,64 + 0,47 + 0,34 + 0,51 = 1,96 \end{aligned}$$

Jadi nilai AVE untuk konstruk laten

$$\begin{aligned} \text{aksesibilitas} &= \frac{1,85}{1,85+1,25} = 0,60 \\ \text{kemampuan ekonomi wilayah} &= \frac{1,26}{1,26+1,21} = 0,51 \\ \text{ketersediaan sarana prasarana} &= \frac{5,65}{5,65+2,28} = 0,71 \\ \text{Kemiskinan} &= \frac{2,63}{2,63+1,96} = 0,57 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat variabel laten di atas memenuhi kriteria $AVE \geq 0,50$ yakni aksesibilitas, kemampuan ekonomi wilayah, ketersediaan sarana prasarana dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan *convergent* yang baik pada indikator dalam tiap konstruk aksesibilitas, kemampuan ekonomi wilayah, ketersediaan sarana prasarana dan kemiskinan.

c. Analisis hubungan antar kosntruk

Diagram Jalur

Tabel 4.24 Koefisien jalur modifikasi model

Variabel		Koef Jalur
Aksesibilitas	→ Ketersediaan sarana prasarana	0,07
Kemampuan ekonomi wilayah	→ Ketersediaan sarana prasarana	0,51
Ketersediaan sarana prasarana	→ kemiskinan	2,56

Sumber: Hasil analisis 2013

Berdasarkan koefisien jalur, dapat disimpulkan pula yakni pada kontruk/variabel x memiliki nilai covergent atau yang memiliki hubungan yang positif dengan variabel y atau ketersediaan sarana prasarana berbanding searah dengan penanggulanagn kemiskinan di Desa Sidoharjo. Pada hubungan konstruk aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah terhadap ketersediaan sarana prasarana maupun kemampuan ekonomi wilayah terhadap aksesibilitas juga memiliki hubungan positif atau searah.

Berdasarkan hasil uji reabilitas model modifikasi, selanjutnya melihat output nilai signifikan model untuk melihat hubungan antar indikator terhadap konstruk serta hubungan antar konstruk eksogen terhadap konstruk endegon.

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kemiskinan	<--- Sarana_Prasarana	2.642	1.214	2.176	.030	
y7	<--- Sarana_Prasarana	1.000				
y6	<--- Sarana_Prasarana	1.906	.773	2.465	.014	
y5	<--- Sarana_Prasarana	.999	.463	2.161	.031	
x3	<--- Aksesibilitas	1.000				
x2	<--- Aksesibilitas	.472	.144	3.287	.001	
x1	<--- Aksesibilitas	.792	.225	3.518	***	
y1	<--- Kemiskinan	1.000				
y2	<--- Kemiskinan	.675	.153	4.412	***	
y3	<--- Kemiskinan	.444	.116	3.818	***	
y4	<--- Kemiskinan	1.019	.204	5.002	***	
x5	<--- Kemampuan_Ekonomi_Wilayah	1.000				
x4	<--- Kemampuan_Ekonomi_Wilayah	.511	.526	.972	.331	

Gambar 4.20 Output nilai *Regression Weights* modifikasi model

Berdasarkan output nilai *Regression Weights*, konstruk ketersediaan sarana prasana memiliki hubungan yang signifikan terhadap konstruk kemiskinan dengan nilai probabilitas $\leq 0,05$ yakni 0,030 serta tiap indikator dalam konstruk ketersediaan sarana prasana, aksesibilitas, kemampuan ekonomi wilayah dan konstruk kemiskinan juga memiliki nilai probabilitas $\leq 0,05$ sehingga masing-masing indikator memiliki hubungan signifikan terhadap konstruknya. Sehingga dapat disimpulkan indikator pada setiap konstruk pada modifikasi model memiliki hubungan signifikan terhadap konstruk masing-masing dalam membentuk model.

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	Kemampuan_Ekonomi_Wilayah	Aksesibilitas	Sarana_Prasarana	Kemiskinan
Sarana_Prasarana	.674	.206	.000	.000
Kemiskinan	.000	.000	1.017	.000

Gambar 4.21 Output *Standardized Direct Effects* modifikasi model

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	Kemampuan_Ekonomi_Wilayah	Aksesibilitas	Sarana_Prasarana	Kemiskinan
Sarana_Prasarana	.000	.000	.000	.000
Kemiskinan	.685	.209	.000	.000

Gambar 4.22 Output *Standardized Indirect Effects* modifikasi model

Pada *output standardized direct effects* berfungsi untuk menunjukkan hubungan langsung antar variabel latent. Pada hasil *output* tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan langsung dari kemampuan ekonomi wilayah dan aksesibilitas ke ketersediaan sarana prasana serta hubungan langsung antara variabel ketersediaan sarana prasana

ke variabel kemiskinan. Pada hasil *output standardized direct effects* besarnya pengaruh langsung dari kemampuan ekonomi wilayah terhadap ketersediaan sarana prasarana sebesar 0,647, sedangkan besarnya pengaruh langsung dari aksesibilitas terhadap ketersediaan sarana prasarana sebesar 0,206. Hubungan langsung anatara variabel ketersediaan sarana prasarana terhadap kemiskinan sebesar 1,017.

Pada *output standardized indirect effects* berfungsi untuk menunjukkan hubungan tidak langsung antar variabel latent. Pada hasil *output* tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan tidak langsung dari kemampuan ekonomi wilayah dan aksesibilitas ke ketersediaan sarana prasarana baru ke variabel kemiskinan. Pada hasil *output standardized indirect effects* besarnya pengaruh tidak langsung dari kemampuan ekonomi wilayah terhadap kemiskinan sebesar 0,685, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung dari aksesibilitas terhadap kemiskinan sebesar 0,209.

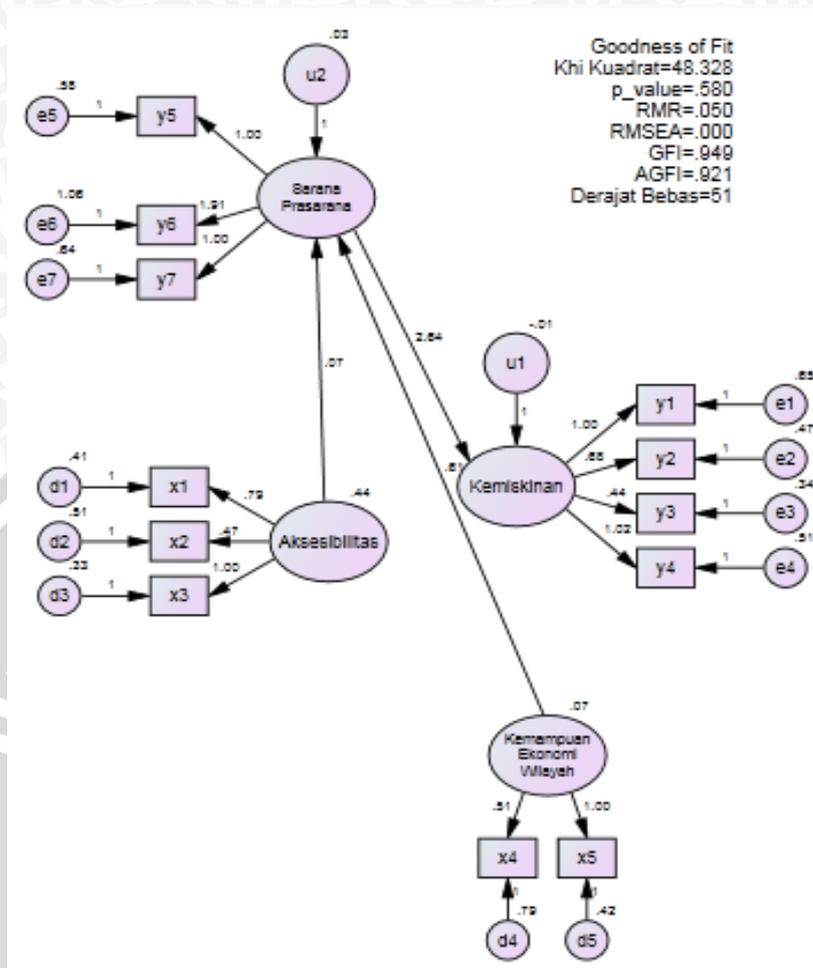
H. Output Analisis SEM

Perbedaan analisis SEM dengan analisis lainnya seperti analisis *path* maupun regerasi salah satunya terletak pada output hasil analisisnya. Pada output hasil analisis *path* hanya menghasilkan faktor determinan sedangkan output analisis SEM menghasilkan tiga output yakni faktor determinan, model struktural, dan model pengukuran

1. Faktor determinan

Pada output hasil analisis SEM, yakni pada regression weight dari ketiga variabel konstruk eksogen, variabel ketersediaan sarana prasarana memiliki nilai probabilitas $\leq 0,05$ baik sebelum modifikasi model maupun sesudah modifikasi model yakni sebelum modifikasi nilai p 0,038 sedangkan sesudah modifikasi model nilai p 0,030 sedangkan terjadi hubungan tidak langsung antara variabel kemampuan ekonomi wilayah dan aksesibilitas terhadap kemiskinan. Besarnya pengaruh tidak langsung dari kemampuan ekonomi wilayah terhadap kemiskinan sebesar 0,685, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung dari aksesibilitas terhadap kemiskinan sebesar 0,209

2. Model akhir struktural



Gambar 4.23 Model struktural akhir faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan

Pada model struktural di atas, terdapat satu indikator pada konstruk ketersediaan sarana prasarana yang dihilangkan yakni indikator jaringan telekomunikasi karena memiliki nilai probabilitas yang tidak signifikan terhadap kosntruk ketersediaan sarana prasarna, sehingga setelah indikator jaringan telekomunikasi dikeluarkan. Pada variabel aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah tidak dihubungkan ke variabel kemiskinan melainkan dihubungkan dengan variabel ketersediaan sarana prasarana. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil output analisis SEM sebelumnya, variabel aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah tidak memiliki hubungan yang nyata (signifikan) terhadap variabel kemiskinan dengan nilai $p \geq 0,05$ (0,670 dan 0,552). Pada output modifikasi analisis SEM di atas dapat di artikan bahwa kemiskinan di Desa Sidoharjo dipengaruhi langsung oleh ketersediaan sarana parasarana dan dipengaruhi secara tidak langsung oleh kemampuan ekonomi wilayah dan aksesibilitas, dimana kemudahan mengakses sarana prasarana desa dipengaruhi oleh kemudahan aksesibilitas desa serta kemampuan ekonomi wilayah Desa Sidoharjo.

3. Model Pengukuran

Model Pengukuran struktural SEM

$$\text{kemiskinan Desa Sidoharjo} = 2,64 * \text{ketersediaan sarana prasarana} + 0,01$$

$$\eta = \beta_2 \eta_2 + \zeta_1$$

Ketersediaan sarana prasaran

$$= 0,07 * \text{aksesibilitas} + 0,51 * \text{kemampuan ekonomi wilayah} + 0,03$$

$$\eta_2 = \gamma_1 \xi_1 + \gamma_2 \xi_2 + \zeta_2$$

Model pengukuran variabel endogen

$$\text{kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar} = 1,00 * \text{kemiskinan} + 0,64$$

$$y_1 = \lambda_1 \eta_1 + \varepsilon_1$$

$$\text{kemampuan pemenuhan pendidikan dan kesehatan} = 0,66 * \text{kemiskinan} + 0,47$$

$$y_2 = \lambda_2 \eta_1 + \varepsilon_2$$

$$\text{bantuan yang diterima} = 0,44 * \text{kemiskinan} + 0,34$$

$$y_3 = \lambda_3 \eta_1 + \varepsilon_3$$

$$\text{pendapatan rumah tangga tidak mencukupi} = 1,02 * \text{kemiskinan} + 0,51$$

$$y_4 = \lambda_4 \eta_1 + \varepsilon_4$$

$$\text{ketersediaan air bersih} = 1,00 * \text{ketersediaan sarana prasarana} + 0,58$$

$$y_5 = \lambda_5 \eta_2 + \varepsilon_5$$

$$\text{kondisi rumah} = 1,91 * \text{ketersediaan sarana prasarana} + 1,06$$

$$y_6 = \lambda_6 \eta_2 + \varepsilon_6$$

$$\text{ketersediaan jaringan listrik} = 1,00 * \text{ketersediaan sarana prasarana} + 0,64$$

$$y_7 = \lambda_7 \eta_2 + \varepsilon_7$$

Model pengukuran variabel eksogen

$$\text{keberadaan alat transportasi umum} = 0,79 * \text{aksesibilitas} + 0,41$$

$$x_1 = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$$

$$\text{jarak desa ke pusat kegiatan} = 0,47 * \text{aksesibilitas} + 0,51$$

$$x_2 = \lambda_2 \xi_1 + \delta_2$$

$$\text{kondisi jalan} = 1,00 * \text{aksesibilitas} + 0,33$$

$$x_3 = \lambda_3 \xi_1 + \delta_3$$

$$\text{ekonomi wilayah} = 0,51 * \text{kemampuan ekonomi wilayah} + 0,79$$

$$x_4 = \lambda_4 \xi_2 + \delta_4$$

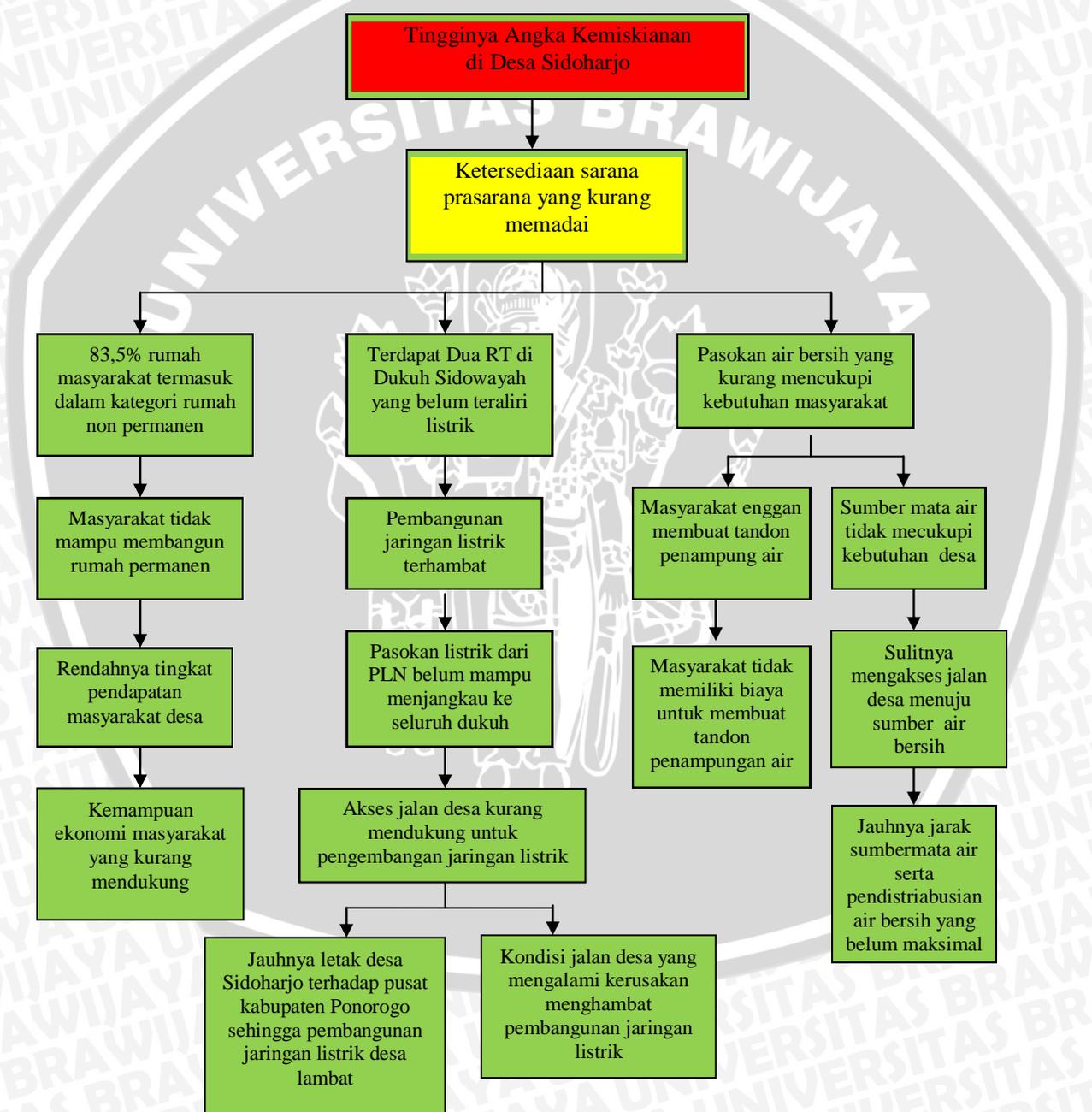
$$fasilitas\ umum = 1,00 * kemampuan\ ekonomi\ wilayah + 0,42$$

$$x_5 = \lambda_5 \xi_2 + \delta_5$$

4.7 Analisis Akar Masalah dan Akar Tujuan

4.7.1 Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah bertujuan untuk meruntut permasalahan kemiskinan di Desa Sidoharjo berdasarkan input dari hasil analisis SEM. Berikut diagram akar permasalahan kemiskinan di Desa Sidoharjo:



Gambar 4.23 Grafik akar masalah kemiskinan Desa Sidoharjo



Pada diagram akar masalah di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan di Desa Sidoharjo dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana desa yang kurang memadai. Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, disebabkan oleh;

a. Kondisi rumah masyarakat termasuk rumah non permanen

Berdasarkan Kecamatan Jambon dalam angka tahun 2012, proporsi rumah non permanen di Desa Sidoharjo mencapai 83,5% yakni sekitar 1.109 unit rumah non permanen dari 1329 unit rumah. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan papan yakni membangun rumah dalam kondisi permanen. Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan papan yang layak disebabkan karena rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan masyarakat membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

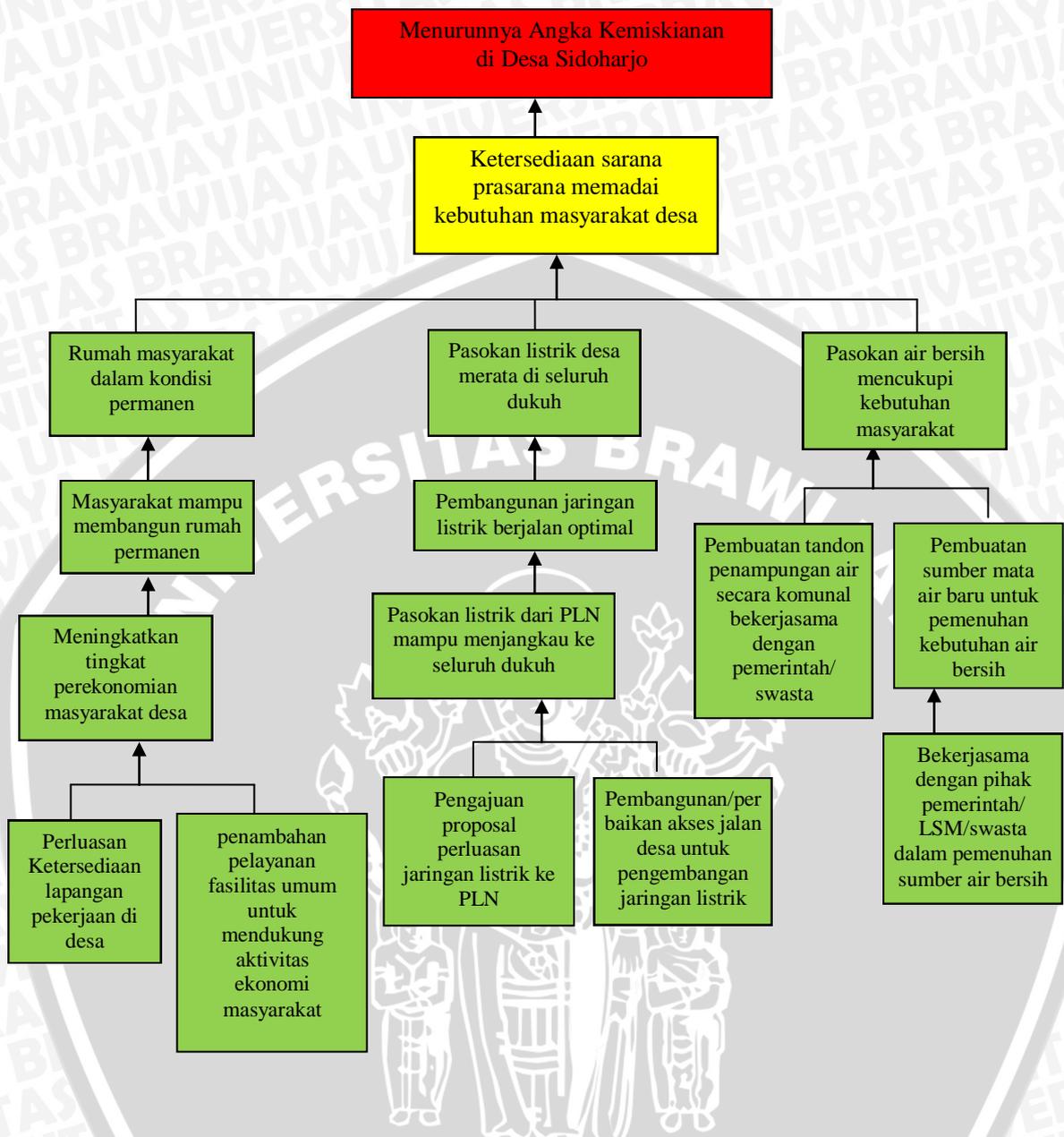
b. Pasokan air bersih yang kurang memenuhi

Pemenuhan air bersih menjadi permasalahan yang terus dialami tiap tahunnya oleh masyarakat Desa Sidoharjo. Kurangnya debit sumber air ketika musim kemarau membuat Desa Sidoharjo sering mengalami kekeringan. Tidak adanya pasokan air bersih dari PDAM membuat masyarakat harus secara aktif mencegah kekeringan di musim kemarau, namun masyarakat masih enggan membuat tendon-tandon penampungan air sehingga masyarakat masih sering mengalami kekeringan. Kekeringan juga mempengaruhi pertanian desa. Masyarakat Desa Sidoharjo lebih memilih menanam tanaman palawija yang membutuhkan air yang sedikit dibandingkan padi sawah.

d. Pasokan listrik yang belum merata

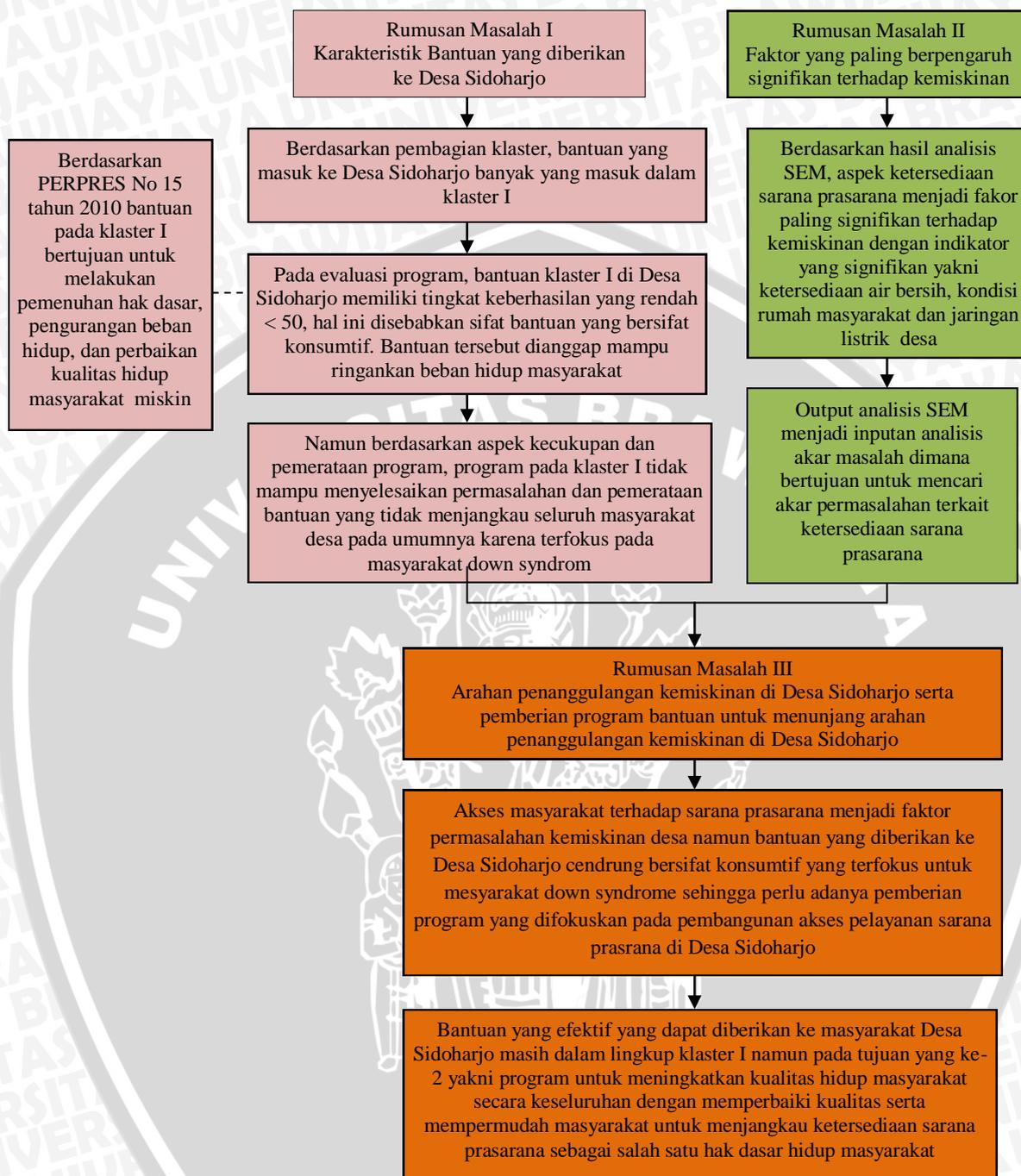
Listrik merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat, dengan adanya listrik masyarakat dapat melakukan aktivitasnya baik aktivitas di rumah maupun aktivitas kerja. Pasokan listrik yang belum merata di dukuh Sidowayah yakni di RT 4 dan RT 11 membuat aktivitas masyarakat desa terhambat. Pembangunan jaringan listrik yang belum merata disebabkan karena akses PLN yang sulit menjangkau hingga dukuh Sidowayah. Akses jalan yang kurang mendukung membuat akses listrik desa belum merata. Selama ini masyarakat di dua RT tersebut menggunakan tenaga diesel dimana bahan bakar yang digunakan yakni bahan bakar minyak sehingga dana yang dikeluarkan cukup banyak.

4.7.4 Akar Tujuan



Gambar 4.24 Grafik akar tujuan kemiskinan Desa Sidoharjo

4.8 Arahan Penanggulangan



Gambar 4.25 Diagram penanganan kemiskinan Desa Sidoharjo
Sumber: Hasil Analisis 2013

Berdasarkan hasil analisis untuk rumusan masalah I, dapat diketahui bahwa bantuan yang masuk ke Desa Sidoharjo lebih banyak bersifat konsumtif yakni dalam kategori bantuan kluster I. Pada evaluasi program, bantuan pada kluster I memiliki tingkat keberhasilan rendah karena tidak mampu mengatasi permasalahan kemiskinan karena sifatnya tidak mampu memenuhi hak dasar hidup masyarakat secara layak dan

memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di Desa Sidoharjo. Bantuan yang difokuskan terhadap masyarakat down syndrome membuat bantuan tidak sepenuhnya menjangkau masyarakat secara merata di Desa Sidoharjo.

Berdasarkan hasil analisis SEM, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Desa Sidoharjo yakni faktor ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai. Oleh karena itu perlu adanya pengalihan bantuan terkait pemenuhan hak dasar hidup masyarakat desa.

4.8.1 Arahan Alternatif Program

Arahan program yang dapat diberikan ke Desa Sidoharjo antara lain yakni program-program yang bersifat menyempurnakan program yang telah terlaksana sebelumnya serta penambahan program-program yang menunjang kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan akses sarana prasarana.

A. Penyempurnaan Program

1. Program pengentasan kemiskinan yang bersifat konsumtif

Program pengentasan kemiskinan yang bersifat konsumtif seperti pemberian raskin dan pemberian garam yodium maupun bantuan makanan sebenarnya tidak dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa Sidoharjo tapi bantuan tersebut masih perlu diberikan terutama untuk masyarakat yang mengalami permasalahan keterbelakangan mental. Masyarakat dengan masalah keterbelakangan mental lebih sulit untuk diberdayakan. Oleh karena itu agar bantuan yang bersifat konsumtif akan lebih efektif apabila dikelola secara khusus oleh lembaga RKS yang menangani permasalahan masyarakat down syndrome di Desa Kreet dan Sidoharjo. Bantuan akan lebih terkelola karena lembaga tersebut yang terjun langsung ke rumah-rumah masyarakat untuk memberikan/menyalurkan bantuan sehingga anggota lembaga lebih mengerti kondisi permasalahan yang dihadapi keluarga dengan permasalahan keterbelakangan mental

2. Rumah Kasih Sayang

Program Rumah Kasih di Desa Kreet merupakan program dari Kementerian Sosial untuk pemberdayaan masyarakat down syndrom yang pengawasannya dilakukan langsung dari pihak Kementerian Sosial. Pada tahun masyarakat down syndrome di Desa Sidoharjo bergabung ke program tersebut, namun karena letak pusat kegiatan di Desa Kreet masyarakat di Desa Sidoharjo

jarang mengikuti kegiatan yang diadakan rutin tiap minggunya. Kelembagaan yang menangani RKS terdiri atas masyarakat dari Desa Kretet dan Desa Sidoharjo. Oleh karena itu perlu adanya penambahan lokasi RKS di Desa Sidoharjo sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkau. Hal ini juga mempermudah kelembagaan lebih fokus pada permasalahan di desa masing-masing.

B. Penambahan Program

Penambahan program diutamakan untuk kemudahan masyarakat dalam menjangkau akses pelayanan, antara lain:

Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa

Pada program percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan Dinas PU kabupaten Ponorogo maupun dinas terkait lainnya. Program percepatan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui program tersebut masyarakat dapat melakukan pembangunan, perbaikan prasarana, dan sarana infrastruktur serta bidang lain. Perbaikan akses jalan menjadi salah satu solusi perbaikan sarana prasarana yang harus diprioritaskan karena perbaikan akses jalan dapat mempermudah pembangunan infrastruktur lainnya. Kemudahan akses masyarakat ke infrastruktur dasar di wilayah perdesaan dapat mendukung peningkatan kegiatan perekonomian.

4.8.2 Arahan Pengoptimalan Peran Kelembagaan

Arahan pengoptimalan peran kelembagaan perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh program pemerintah. Pengoptimalan peran lembaga dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3. Memperbaiki sistem administrasi kelembagaan desa sehingga program bantuan yang masuk dapat terdata dengan baik
2. Meningkatkan kualitas/kemampuan pegawai di kelembagaan pemerintahan sehingga kinerja pemerintahan desa dapat optimal. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan pengadaan penyuluhan dari pihak kecamatan maupun dari pemerintahan Kabupaten Ponorogo, selain itu pengadaan workshop bagi pegawai pemerintahan desa sebagai peningkatan kemampuan kinerja pegawai
4. Memperbaiki kordinasi pemerintah desa dengan kelembagaan yang ada di Desa Sidoharjo. Perlu adanya keterlibatan kelembagaan dalam tahap

perencanaan pelaksanaan bantuan sehingga pihak kelmbagaan tidak sekedar menjadi penerima maupun pelaksanaan bantuan.

4.8.3 Arahan Pemenuhan Akses Pelayanan Sarana Prasarana

Berdasarkan analisis akar tujuan, arahan penanganan yang dapat dilakukan yakni

1. Pemenuhan Kebutuhan rumah layak huni

Pemenuhan kebutuhan layak huni dapat dikembangkan dengan program rumah sangat murah yakni program bantuan gratis dari pemerintah kepada warga miskin yang rumahnya kumuh, untuk diperbaiki sehingga menjadi layak huni. Program tersebut dibagi menjadi rumah sangat murah dan rumah murah. Rumah sangat murah, ditujukan bagi masyarakat yang termasuk dalam kriteria masyarakat sangat miskin dan akan dihargai Rp 5-10 juta. Pembiayaannya dapat berasal dari dana bantuan BUMN, maupun perusahaan swasta. Program selanjutnya bagi masyarakat yang tidak mampu membeli program rumah sangat murah yakni pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Program dilakukan dengan pendataan terlebih dahulu terkait masyarakat yang memerlukan bantuan program tersebut. Anggaran yang biasa diberikan pemerintah yakni Rp 7.500.000,-/rumah. Program bertujuan untuk mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Program-program bantuan tersebut telah mulai diterapkan sehingga menjadi alternatif yang dapat berlanjut penerapannya untuk mengatasi permasalahan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Desa Sidoharjo.

2. Pemenuhan Pasokan air bersih untuk masyarakat

Desa Sidoharjo merupakan salah satu wilayah yang sering mengalami kekeringan di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih:

- Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan PDAM maupun Dinas PU dalam pembuatan tendon-tendon penampungan secara komunal yang dapat dilakukan tiap RT sebagai persediaan air bersih ketika musim kemarau. Misalnya Dinas PU dapat memberikan bantuan dengan perbaikan akses jalan untuk mempermudah penyaluran air ke rumah-rumah. PDAM dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dengan membangun tandon-tandon penampungan air komunal maupun pembangunan pipa-pipa penyaluran air
- Pemerintah desa bekerja sama dengan Dinas PU Kabupaten Ponorogo

dalam perbaikan akses jalan untuk mempermudah penyaluran pipa-pipa air untuk distribusi air desa

- Bekerja sama dengan pihak swasta dengan membuat sumber mata air baru maupun membuka akses untuk pembuatan sumber air dari PAMSIMAS.

3. Perluasan pasokan listrik oleh Pemerintah

Pasokan listrik yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat desa disebabkan oleh akses pembangunan jaringan listrik yang terhambat. Oleh karena itu diperlukan terobosan/inisiatif dari masyarakat maupun lembaga pemerintahan desa untuk menangani permasalahan pemenuhan listrik desa. Hal yang dapat dilakukan pemerintah desa yakni pengajuan proposal perluasan pembangunan sarana listrik di Desa Sidoharjo. Berdasarkan usulan yang diajukan pemerintah desa, PLN dapat lebih cepat melakukan perluasan pemasangan jaringan listrik pada dukuh yang belum terlayani listrik. Selain itu, untuk mempermudah perluasan jaringan listrik perlu dilakukan perbaikan akses jalan untuk mendukung kemudahan pemasangan jaringan.

